

**EFEKTIFITAS PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM)
MANDIRI PERKOTAAN DALAM MENUNJANG
PEMBANGUNAN DESA
(Studi di Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten
Sidoarjo)**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH:
YOGI EKA PRASTIYA
NIM : 102020100012

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO
2014
EFEKTIFITAS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERKOTAAN DALAM
MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA
(Studi di Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo)

SKRIPSI

Disusun Sebagai Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo



DISUSUN OLEH:
YOGI EKA PRASTIYA
NIM : 102020100012

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO
2014
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Judul : EFEKTIFITAS PROGRAM NASIONAL
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERKOTAAN
 DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA (Studi Di Desa
 Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo)

Nama : Yogi Eka Prastiya

NIM : 102020100012

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Pembimbing : Dr. Dra. Luluk Fauziah, M.Si

Konsultasi :

Tanggal	Paraf Pembimbing	Keterangan
		Acc Judul
		Acc bab I
		Acc bab II
		Acc bab III
		Acc bab IV
		Acc bab V

Tanggal selesai skripsi : 30 Mei 2014

Sidoarjo, 20 Juni 2014

Mengetahui

Dekan FISIP
Pembimbing

Dosen

Totok Wahyu Abadi, M.Si
Fauziah, M.Si

Dr. Dra. Luluk

LEMBAR PERSETUJUAN

Nota : Pembimbing
Lampiran : (Jumlah eksemplar skripsi)
Perihal : Naskah Skripsi

Yang Terhormat,
Dekan Fakultas FISIP
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan, evaluasi serta perbaikan dan penyempurnaan

Terhadap skripsi atas nama saudara :

Nama	: Yogi Eka Prastiya
Nim	: 102020100012
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Politik
Judul	: Efektifitas PNPM Mandiri Perkotaan Dalam Menunjang
Pembangunan	
	Desa (Studi Di Desa Buduran Kecamatan Buduran
Kabupaten	
	Sidoarjo)

Kami berpendapat bahwa skripsi ini telah cukup lengkap untuk diujikan dalam

Rangka menyelesaikan studi tingkat Sarjana pada Program Studi Ilmu administrasi

Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Berkaitan tersebut diatas, dengan ini kami ajukan skripsi ini pada fakultas untuk

Diuji dengan segera

Demikian atas kebijaksanaan ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sidoarjo, 13 Juni 2014

Mengetahui
Dekan
Pembimbing

Dosen

Totok Wahyu Abadi, M.Si
Fauziah, M.Si

Dr. Dra. Luluk

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “ Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Dalam Menunjang Pembangunan Desa (Studi Di Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo)” adalah hasil karya murni pemikiran peneliti bukan hasil tiruan atau duplikasi dari tulisan lain terkecuali adanya kutipan-kutipan ataupun pernyataan sebagaimana telah disebutkan sumbernya sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah pada umumnya.

Peneliti bersedia menerima segala sanksi sesuai dengan peraturan akademis fakultas apabila terbukti karya ini tidak sesuai dengan pernyataan yang saya buat. Adapun selanjutnya keseluruhan isi, ide serta gagasan dalam karya ilmiah ini sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab penulis.

Juni 2014

Sidoarjo, 13

Prastiya

Yogi Eka

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Dalam Menunjang Pembangunan Desa (Studi di Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo)”

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi :

Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Pada
Hari Jum’at
Tanggal 13 Juni 2014
Bertempat di kampus satu Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Dewan Penguji :

Ketua	: Dr. Dra. Luluk Fauziah, M.Si.	()
Penguji I	: Dra. Arsiyah, M.Si.	()
Penguji II	: Isna Fitriah Agustina, M.Si.	()
Penguji III	: Dra. Isnaini Rodiyah, M.Si.	()

Mengetahui
Dekan FISIP

Totok Wahyu Abadi, M.Si

MOTTO

“Jadi Diri Sendiri, Cari Jati diri, dan Dapatkan Hidup Yang Mandiri

Optimis, Karena Hidup Terus Mengalir Dan Kehidupan Terus

Berputar Sese kali Liat Ke Belakang Untuk Melanjutkan Perjalanan

Yang Tiada Berujung”

(Mario Teguh)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi syukur atas kehadiran Allah SWT karena rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektifitas Program PNPM Mandiri Perkotaan Dalam Menunjang Pembangunan Desa (Studi Di Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo),” adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk diajukan sebagai persyaratan guna memperoleh gelar sarjana di Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Achmad Jainuri, M.A, Ph.D, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
2. Totok Wahyu Abadi, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang telah memberikan ijin penelitian
3. Ainur Rochmania M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang telah memberikan kesempatan untuk ujian skripsi.
4. Dr. Dra. Luluk Fauziah, M.Si. selaku dosen pembimbing yang bersedia meluangkan waktu dan kerelaan hati untuk memberikan bimbingan, nasehat petunjuk, saran dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini
5. Bapak dan Ibu dosen pengajar di Jurusan Ilmu administrasi Negara yang telah memberikan bekal ilmu selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
6. Bapak Arifin dan Ibu Rumiana selaku kepala desa dan perangkat desa, serta Bapak Paiman dan Ibu Novi selaku Kordinator dan Anggota PNPM Mandiri desa Buduran yang semuanya menjadi pembimbing selama saya melakukan penelitian di desa Buduran
7. Bapak Su'udi dan Ibu Sukarti sebagai orang tua saya yang senantiasa memberikan kasih sayang, do'a, dorongan, semangat, dan menjadi inspirasi dalam setiap langkahku.
8. Adekku (Feri dwi Iswanto dan Arum Fristia), dan seseorang yang kelak menjadi pendampingku senantiasa mendoakan agar cepat lulus, terima kasih atas dukungannya dan motivasinya
9. Teman-teman satu perjuanganku dalam bangku kuliah yang telah banyak memberikan bantuan selama kuliah

10. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu

Penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menambah wawasan bagi semua pihak

Sidoarjo, 13

Juni 2014

Penulis

ABSTRAK

Pembangunan yang dilakukan dalam rangka membangun manusia Indonesia seluruhnya mencakup keseluruhan kehidupan masyarakat yang terdiri atas berbagai bidang serta sektor yang saling terkait. Pelaksanaannya oleh masyarakat dengan bantuan bimbingan pemerintah daerah sesuai tugas pokok dan tanggung jawab masing-masing. Dalam keterpaduan pembangunan diperlukan adanya usaha, prakarsa, swadaya dan peran aktif dari masyarakat. Masyarakat dan pemerintah harus menciptakan kerjasama yang baik.

PNPM Mandiri Perkotaan adalah salah satu program pemerintah yang didirikan untuk menanggulangi kemiskinan dan memberdayakan masyarakat miskin secara mandiri. Program ini berupaya menyiapkan landasan kemandirian masyarakat dengan menciptakan program-program dan pelatihan khusus untuk masyarakat miskin di desa di dalam lingkup perkotaan. Program ini merupakan kelanjutan dari Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) yang telah dilaksanakan sejak tahun 1999.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Efektifitas program PNPM Mandiri Perkotaan dalam menunjang pembangunan di Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan nyata dan sejelas mungkin dari efektifitas pelaksanaan program PNPM Mandiri Perkotaan yang telah dilaksanakan di Desa Buduran. Hasil dari penelitian tentang efektifitas program PNPM Mandiri Perkotaan adanya kordinasi yang kurang baik antar anggota pemegang kendali PNPM sehingga mengakibatkan terkendalanya berbagai program yang telah diajalkan. Untuk itu harus ada kesadaran dari masing-masing anggota dan kerjasama yang baik.

Kata kunci : PNPM Mandiri Perkotaan, Pembangunan

ABSTRACT

Development carried out in order to build Indonesian man entirely cover the whole of society that consists of various fields and sectors that are interrelated. Implementation by the community with the help of the guidance of the local government according to the task and the principal responsibilities of each. In the absence of the necessary integration of development effort, initiative, self-help, and the active role of the society. Society and the government should create a good cooperation.

Urban PNPM is one government program that was established to reduce poverty and empower poor communities independently. This program seeks to prepare the ground independence of the rural poor in the urban sphere. This program is a continuation of urban poverty alleviation programs have been implemented since 1999.

Purpose of this study was to determine the effectiveness of the program in supporting urban PNPM development in rural districts Buduran, Buduran Sidoarjo district. Methods used in this research is descriptive qualitative picture or description above gives a real situation as clear as possible of the effectiveness of the implementation of urban PNPM programs that have been implemented in the village Buduran. The results of research on the effectiveness of the program urban PNPM poor lack of coordination among members in control, resulting in a need to control PNPM programs that have been implemented. For it must be awareness of each member and cooperation.

Keywords : Urban PNPM, Development

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT IN ENGLISH	ix
ABSTRAKSI	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7

1.4 Manfaat Penelitian

..... 8

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

..... 9

2.2 Landasan Teori

..... 23

2.2.1 Pengertian Efektifitas

..... 23

2.2.2 Pengertian PNPM Mandiri

..... 29

2.2.3 Pengertian Desa

..... 36

2.2.4 Pengertian Pembangunan desa

..... 39

2.3 Alur Kerangka Penelitian

..... 45

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

..... 46

3.2 Lokasi Penelitian

..... 46

3.3 Fokus Penelitian

..... 46

3.4 Penentuan Informan

..... 47

3.5 Jenis dan Sumber Data

..... 48

3.6 Penentuan Subjek Penelitian

..... 48

3.7 Teknik Analisis Data

..... 50

BAB IV PENGANALISISAN DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian	51
4.1.1 Keadaan Geografis	50
4.1.2 Kondisi Demografis	52
4.1.3 Struktur Organisasi Desa Buduran	55
4.1.4 Profil PNPM Mandiri Perkotaan	56
4.1.5 Karakteristik Informan	58
4.2 Temuan Hasil Penelitian	60
4.2.1 Efektifitas PNPM Mandiri Perkotaan dalam menunjang pembangunan di desa Buduran	60
4.2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Efektifitas PNPM Mandiri Perkotaan dalam menunjang pembangunan di desa Buduran ...	67
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	70
4.3.1 Efektifitas PNPM Mandiri Perkotaan dalam menunjang pembangunan di desa Buduran	70
4.3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Efektifitas PNPM Mandiri Perkotaan dalam menunjang pembangunan di desa Buduran ...	73

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan	77
5.2 Saran-Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Matrik Hasil Penelitian Terdahulu	
.....	15
Tabel 2.2 Perbandingan Karakteristik Desa dan Kota	
.....	37
Tabel 4.1 Kondisi Demografis Desa Buduran	
.....	52
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Pendidikan	
.....	52
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian	
.....	52
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Agama	
.....	53
Tabel 4.5 Daftar Informan	
.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	
.....	44
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Buduran	
.....	54
Gambar 4.2 Struktur Anggota PNPM Mandiri Perkotaan Desa Buduran	
.....	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data informan	
.....	81
Lampiran 2 Pedoman wawancara	
.....	84
Lampiran 3 Dokumentasi lokasi penelitian	
.....	86
Lampiran 3 Surat izin penelitian	
.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, dengan predikat sebagai negara berkembang Indonesia berusaha mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara efisien. Salah satu segi pembangunan yang umumnya dihadapi oleh negara-negara berkembang ialah bagaimana meningkatkan akselerasi pembangunan di daerah pedesaan dan perkotaan. Fakta mengungkapkan bahwa di beberapa negara yang sedang berkembang, perkembangan pedesaan sering kalah cepat dibandingkan daerah perkotaan. Padahal khususnya Indonesia sebagai negara berkembang sebagian besar penduduknya bermukim di pedesaan. Kondisi demikian lebih lanjut menuntut perhatian pemerintah untuk meningkatkan pembangunan di daerah pedesaan dan perkotaan secara seimbang.

Pembangunan yang dilakukan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seluruhnya mencakup keseluruhan kehidupan dari penghidupan masyarakat dan terdiri atas berbagai bidang serta sektor yang saling terkait. Pelaksanaannya oleh masyarakat dengan bantuan bimbingan pemerintah daerah sesuai tugas pokok dan tanggung jawab masing-masing. Dalam keterpaduan pembangunan diperlukan adanya usaha, prakarsa, swadaya dan peran aktif dari masyarakat. Masyarakat dan

pemerintah harus menciptakan pembangunan yang partisipatif. Pembangunan partisipatif merupakan pendekatan pembangunan yang sesuai dengan otonomi daerah yang meletakkan landasan pembangunan yang tumbuh berkembang dari masyarakat, diselenggarakan secara sadar dan mandiri oleh masyarakat dan hasilnya dinikmati oleh seluruh masyarakat (Sumaryadi, 2005) Melalui program-program pembangunan partisipatif tersebut diharapkan semua elemen masyarakat dapat secara bersama-sama berpartisipasi dengan cara mencurahkan pemikiran dan sumber daya yang dimiliki guna memenuhi kebutuhannya sendiri. Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia pada dasarnya merupakan suatu usaha yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan. Dimana pembangunan yang berlandaskan kesadaran masyarakat akan membawa adanya perubahan yang positif dalam berbagai dimensi kehidupan dan dalam berbagai lapisan masyarakat yang berada dalam suatu wilayah penyelenggaraan pemerintah. Pada saat kita melihat bahwa penyelenggaraan itu terjadi dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara, maka perubahan yang diisyaratkan oleh pembangunan adalah pembangunan yang berlangsung secara nasional.

Efektifitas pembangunan bisa berjalan dengan optimal apabila ada dukungan dan partisipasi dari masyarakat. partisipasi masyarakat sangat penting dalam mendukung program-program pemerintah agar berjalan optimal. Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses teknis untuk memberikan masyarakat kesempatan dan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat untuk secara bersama-sama memecahkan berbagai persoalan. Suryono (2004) menyampaikan

bahwa partisipasi masyarakat mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat dalam upaya meningkatkan proses belajar masyarakat, mengarahkan masyarakat menuju masyarakat yang bertanggung jawab, mengeliminasi perasaan terasing sebagian masyarakat serta menimbulkan dukungan dan penerimaan dari pemerintah.

Pemerintah sebagai penyelenggaran pemerintahan memiliki kewajiban dalam merumuskan program-program yang tepat untuk upaya pemerataan pembangunan yang ada didalam pedesaan atau perkotaan. Dalam rangka pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, diperlukan perencanaan dan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait untuk memecahkan masalah yang ada, sementara itu masalah ekonomi kerakyatan Indonesia hingga saat ini merupakan suatu masalah yang sangat kompleks. Hal ini disebabkan oleh faktor sumber daya manusia dan faktor penunjang lainnya yang kurang memadai bagi pembangunan, maupun untuk pemenuhan kebutuhan hidup anggota masyarakat sehari-hari khususnya masyarakat desa. Pentingnya masalah sumber daya manusia ini disebabkan pula adanya kenyataan bahwa di satu sisi jumlah penduduk semakin bertambah dengan konsekuensi semakin besarnya kebutuhan hidup, sedangkan disisi lain jumlah lapangan kerja semakin berkurang dan berkurangnya lahan pertanian yang telah menjadi pemukiman penduduk. Menyadari semakin meluasnya aktifitas masyarakat dalam berbagai bidang, maka banyak masalah yang timbul, yaitu pengangguran dan kurangnya modal bagi masyarakat desa.

Melihat kenyataan diatas perlu adanya badan atau program pemerintah yang dapat membantu masyarakat khususnya dalam pengembangan usaha ditengah-

tengah keterbatasan modal yang kurang serta menghadapi masalah pengangguran yang banyak terjadi. Melalui Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional serta untuk meningkatkan efektifitas pembangunan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri pada tahun 2007. Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Program PNPM Mandiri pada dasarnya terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati oleh masyarakat, meliputi penyediaan dan perbaikan prasarana atau sarana lingkungan pemukiman, sosial dan ekonomi secara kegiatan padat karya. Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah lokal melalui penyadaran krisis, pelatihan keterampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penempatan tata pemerintahan yang baik. Dalam pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat paling miskin di wilayah pedesaan.

Pelaksanaan PNPM mandiri tahun 2007 dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di pedesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi; Program Penanggulangan Kemiskinan di perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan; dan Percepatan Pembangunan Daerah tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan

daerah tertinggal, pasca bencana dan konflik. Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya.

PNPM Mandiri diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen/sektor dan pemerintah daerah. Pelaksanaan PNPM Mandiri 2008 diprioritaskan pada desa-desa yang tertinggal. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan dan pemerataan pembangunan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Dengan pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam kerangka kebijakan PNPM Mandiri, cakupan pembangunan diharapkan dapat diperluas hingga ke daerah-daerah terpencil dan terisolir. Efektifitas dan efisiensi dari kegiatan yang selama ini sering berduplikasi antar proyek diharapkan dapat juga diwujudkan. Mengingat proses pemberdayaan pada umumnya membutuhkan waktu 5 sampai 6 tahun, maka PNPM Mandiri akan dilaksanakan sekurang-kurangnya hingga 2015. Hal ini sejalan dengan target waktu pencapaian tujuan pembangunan milenium atau *Millennium Development Goals* (MDGs)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Perkotaan adalah kelanjutan dari Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) yang telah dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam

menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini berupaya menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan masyarakat yang representatif, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (*sosial capital*) masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat (Pedoman Umum PNPM Mandiri, 2007).

Wilayah studi dalam penelitian ini adalah Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang merupakan desa yang menjadi sasaran Program PNPM Mandiri, sehingga masyarakat yang tinggal di daerah tersebut juga berhak atas dana dari program PNPM Mandiri. Setelah berjalannya program PNPM Mandiri di desa Buduran Kecamatan Buduran, ternyata membawa banyak perubahan terhadap perekonomian dan pembangunan di desa tersebut.. Modal dan dana yang diperoleh dari Program PNPM Mandiri tersebut dapat digunakan oleh masyarakat setempat sebagai modal untuk berdagang, beternak dan usaha lainnya. Namun hal ini tidak di imbangi dengan koordinasi dan kerjasama yang baik antar anggota, sehingga program yang berjalan kurang bisa tertata dengan baik. Dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis berkeinginan untuk meneliti **“Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Dalam Menunjang Pembangunan Desa”**

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut;

1.2.1. Bagaimana efektifitas program PNPM Mandiri Perkotaan dalam menunjang pembangunan di Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo?

1.2.2. Apakah faktor pendukung dan faktor penghambat program PNPM Mandiri Perkotaan dalam menunjang pembangunan di Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo

1.3 Tujuan penelitian

1.3.1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektifitas program PNPM Mandiri dalam menunjang pembangunan di Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo

1.3.2. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat program PNPM Mandiri dalam menunjang pembangunan di Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

1.4.1.1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan memperkaya untuk perkembangan ilmu Administrasi Negara khususnya kajian yang berhubungan dengan penyelenggaraan program pemerintah

1.4.1.2. Penelitian ini diharapkan juga dapat dipakai sebagai acuan bagi semua pihak-pihak yang sedang melakukan kajian yang terkait dengan program-program yang ditetapkan oleh pemerintah

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan masyarakat desa akan pentingnya partisipasi mereka dalam mendukung program PNPM Mandiri sehingga program ini dapat berjalan dengan baik.

1.4.2.2. Penelitian ini diharapkan dapat memberi bahan masukan dan pertimbangan kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi mereka dalam program PNPM Mandiri sehingga program ini dapat berjalan dengan baik

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

2.1.1 Dampak Pelaksanaan Program PNPM Mandiri Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Desa Darupono Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal (Agus Budiyo, 2010)

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dampak pelaksanaan program PNPM Mandiri terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di Desa Darupono Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif karena data akan dianalisis dengan menggunakan kata-kata. Lokasi penelitian di Desa Darupono Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal. Fokus penelitiannya adalah dampak pelaksanaan program PNPM Mandiri terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di Desa Darupono Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal dengan indikator : 1.) Bertambahnya penghasilan keluarga 2.) Adanya peningkatan daya beli 3.) Adanya peningkatan pendidikan anak ke jenjang yang lebih tinggi 4.) Adanya peningkatan konsumsi keluarga.

Sumber data penelitian menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi, observasi, dan wawancara. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan/verifikasi. Kesimpulan dari hasil penelitian terdapat beberapa dampak pelaksanaan program PNPM Mandiri terhadap peningkatan masyarakat di Desa

Darupono Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal diantaranya : 1.) PNPM Mandiri sangat berdampak positif terutama pada pembangunan sarana dan prasarana desa 2. PNPM Mandiri sangat membantu dalam meningkatkan tumbuhnya usaha kecil dan menengah 3. Dalam PNPM Mandiri seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya

2.1.2 Dampak Program Dana Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Medan Kota (Ahmad Sai Samosir, 2012)

Penelitian bertujuan untuk menganalisis kegiatan program dana bergulir PNPM Mandiri Perkotaan yang telah dilaksanakan di Kecamatan Medan Kota dan menganalisis dampak program dana bergulir PNMP Mandiri perkotaan terhadap kesejahteraan masyarakat Kecamatan Medan Kota. Sampel responden diambil sebanyak 100 orang dari 12 Kelurahan yang terdapat di Kecamatan Medan Kota yang memperoleh pinjaman dana bergulir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Medan Kota berdasarkan pelaksanaan yang telah dilakukan Penanggung Jawab Operasional (PJOK) berjalan cukup baik, hal ini disebabkan kegiatan pelaksanaan berjalan sesuai dengan prosedur Pedoman Umum PNPM Mandiri Perkotaan, seperti dilaksanakannya Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM) Diskusi Kelompok Terarah (DKT) atau Focus Group Discussion (FGD) Pemetaan Swadaya, Perencanaan Jangka Menengah Program

Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis) dan Mekanisme Penyaluran Dana dan Pemanfaatan Bantuan. Selain itu dalam pelaksanaan program dana bergulir PNPM Mandiri Perkotaan juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti proses pelaksanaan program, dimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan program ini menunjukkan pada tingkat selalu ikut dengan persentase sebanyak 63%, dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program ini menunjukkan pada tingkat selalu ikut dengan persentase sebanyak 52%. Program dana bergulir PNPM Mandiri Perkotaan memberikan dampak positif terhadap pendapatan masyarakat, hal ini disebabkan pendapatan masyarakat Kecamatan Medan Kota meningkat setelah adanya program dana bergulir PNPM Mandiri Perkotaan.

2.1.3 Efektifitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (PNPM MP SPP) Di Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara Pada Periode Tahun 2010 (Mustika Rihadini, 2012)

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan efektifitas pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (PNPM MP SPP) di Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara Pada Periode Tahun 2010. Penelitian ini menggunakan metode metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini adalah Efektifitas pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (PNPM MP SPP) di Kecamatan

Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Pada Periode Tahun 2010 sudah cukup efektif namun belum maksimal, dapat dilihat dari mekanisme pelaksanaannya yang sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dan terlihat dari antusias partisipasi masyarakat dalam tahapan-tahapan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan khususnya SPP, Namun sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program ini belum dapat dicapai secara maksimal, hal ini disebabkan karena adanya kelompok masyarakat yang masuk dalam kategori Rumah Tangga Miskin (RTM) tetapi belum dapat mengakses pinjaman dana SPP ini.

2.1.4 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Di Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan Kota Surabaya (Studi Mengenai Pengelola Lingkungan) (Sagita Ayu Kinanti, 2010)

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui PNPM Mandiri di Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan Kota Surabaya mengenai pengelola lingkungan agar tercipta tata kehidupan masyarakat yang nyaman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang memiliki satu variabel yaitu Pemberdayaan Masyarakat melalui PNPM Mandiri. Fokus penelitian adalah pendataan kondisi prasarana dan penyusunan rencana pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana. Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa dalam melakukan pendataan kondisi prasarana terlebih dahulu diawali dengan pembentukan Tim Pengelola Operasi dan Pemelihara (O&P), tujuannya untuk mendata jenis prasarana lingkungan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat, pendataan dilakukan setiap satu bulan sekali dengan melakukan

survei ke lokasi. Sedangkan penyusunan rencana pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana melalui perbaikan prasarana dari dana BLM (hibah) PNPM Mandiri yang tujuannya untuk menjaga prasarana agar tetap berfungsi secara optimal dan berkesinambungan.

2.1.5 Partisipasi Masyarakat Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan (Studi Deskriptif di Kelurahan Aek Simotung, Kecamatan, Sumatera Utara) (Angga Harahap, 2010)

Penelitian bertujuan untuk menganalisis bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam PNPM-MP di lapangan dan masalah serta hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Setelah melakukan penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan baik pada tahap sosialisasi dan perencanaan maupun tahap pelaksanaan dan pengawasan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari keikutsertaan dan peran aktif masyarakat dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Program ini juga dapat dikatakan membawa perubahan yang positif baik dari segi lingkungan, pembangunan manusia, dan perihal pemberdayaan masyarakat. Namun, ada sebagian masyarakat lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan kelompok. Artinya, tidak semua masyarakat berpartisipasi dengan tujuan kesejahteraan kelompok melainkan upah atau imbalan. Disamping itu, adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap kader atau pelaku kegiatan dipedesaan. Hal ini terjadi karena sebagian kecil yang memperhatikan informasi yang disampaikan papan informasi, yang merupakan

sebagai pusat informasi dan transparansi pelaksanaan kegiatan. Hambatan lain adalah pengerjaan proyek belum sampai pada tahap penyelesaian tetapi dana sudah habis. Namun hal ini dapat diatasi dengan cara membayarkan upah pekerja terlebih dahulu dan supplier akan dibayar setelah pencairan dana berikutnya. adapun hasil penelitian terdahulu dapat juga dilihat dari tabel matrik berikut ini :

Tabel 2.1 Matrik Hasil Penelitan Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Tujuan Penelitian	Teori yang digunakan	Jenis dan metode penelitian	Hasil penelitian	Pembeda
1.	Agus Budiyo (2010)	Mengetahui dampak pelaksanaan program pnpm mandiri terhadap peningkatan pendapatan masyarakat didesa Darupono Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal	Pemberdayaan	Jenis Penelitian deskriptif kualitatif menggunakan metode observasi data, wawancara serta dokumentasi	PNPM mandiri sangat membantu peningkatan tumbuhnya usaha kecil dan menengah yang ada pada masyarakat desa yang selama ini hanya bergantung pada hasil pertanian, PNPM Mandiri berdampak positif terutama pada pembangunan sarana dan prasarana yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Dalam program PNPM	Peneliti Agus Budiyo lebih memfokuskan dampak program PNPM Mandiri terhadap pendapatan masyarakat, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada pembangunan desa dan program- program pendukungnya

					mandiri masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sampai pada saat pelaksanaan kegiatan.	
2.	Ahmad Sai Samosir (2012)	Menganalisis kegiatan program dana bergulir PNPM Mandiri Perkotaan yang telah dilaksanakan di Kecamatan Medan Kota dan menganalisis dampak	Pemberdayaan	Jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode survey	Pelaksanaan PNPM Mandiri perkotaan di Kecamatan Medan Kota berdasarkan pelaksanaan yang telah dilakukan Penanggung Jawab Operasional (PJOK) berjalan cukup baik, hal ini disebabkan kegiatan	Ahmad Sai lebih membahas tentang analisis kegiatan program dana bergulir PNPM Mandiri Perkotaan sedangkan peneliti lebih memfokuskan pada analisa program dana bergulir PNPM, sedangkan penelitian ini lebih fokus terhadap pembangunan desa

		program dana bergulir PNPM Mandiri perkotaan terhadap kesejahteraan masyarakat Kecamatan Medan Kota			pelaksanaan berjalan sesuai prosedur pedoman umum PNPM Mandiri perkotaan seperti dilaksanakannya Rembuk Kesiapan Masyarakat (RKM), Diskusi Kelompok Terarah (DKT) atau <i>focus group discussion</i> (FGD), Pemetaan Swadaya, Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis) dan mekanisme penyaluran dana dan pemanfaatan bantuan	
--	--	---	--	--	--	--

3.	Mustika Rihadini (2012)	Mendeskripsikan efektifitas pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan pada kelompok simpan pinjam perempuan (PNPM MP SPP) Di kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan	Teori Pemberdayaan dan efektifitas	Jenis penelitian kualitatif	Efektifitas pelaksanaan program PNPM mandiri pedesaan pada kelompok simpan pinjam perempuan (PNPM MP SPP) di Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Sleatan Provinsi Sulawesi Tenggara pada peridoe tahun 2010 sudah cukup efektif namun belum maksimal, dapat dilihat dari	Mustika Rihadini hanya fokus membahas tentang efektifitas kelompok simpan pinjam, Sedangkan Penelitian ini fokus terhadap efektifitas PNPM Mandiri Perkotaan dalam menunjang pembangunan desa

		Provinsi Sulawesi Tenggara			mekanisme pelaksanaannya yang sudah sesuai dengan petunjuk teknis operasional (PTO) dan terlihat antusias partisipasi masyarakat dalam tahapan-tahapan pelaksanaan PNPM Mandiri perdesaan khususnya SPP, namun sasaran yang ingin dicapai dalam program ini belum dapat dicapai secara maksimal	
--	--	----------------------------------	--	--	---	--

4.	Sagita Ayu Kinanti (2010)	Mengetahui dan mendeskripsikan tentang pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri di Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan Kota Surabaya mengenai pengelola lingkungan agar tercipta tata kehidupan masyarakat yang nyaman.	Teori Pemberdayaan	Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif	Bahwa dalam melakukan pendataan kondisi prasarana terlebih dahulu diawali dengan pembentukan tim pengelola operasi dan pemelihara dengan tujuan untuk mendata jenis prasarana lingkungan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat pendataan dilakukan setiap satu bulan sekali dengan melakukan survey ke lokasi sedangkan penyusunan rencana pemanfaatan dan pemeliharaan	Sagita Ayu Kinanti lebih memfokuskan terhadap pengelolaan lingkungan, sedangkan penelitian ini lebih fokus terhadap pembangunan desa

					<p>prasarana melalui perbaikan prasarana dari dana BLM (hibah) PNPM Mandiri yang tujuannya untuk menjaga prasarana agar tetap berfungsi secara optimal dan berkesinambungan</p>	
5.	Angga Harahap (2010)	<p>Menganalisis bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam PNPM-MP dilapangan dan masalah serta hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaannya</p>	Teori Partisipasi	Jenis penelitian kualitatif	<p>Bahwa partisipasi masyarakat dalam PNPM Mandiri pedesaan baik dalam tahap sosialisasi dan perencanaan maupun tahap pelaksanaan dan pengawasan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari keikutsertaan dan peran aktif</p>	<p>Angga Harahap lebih memfokuskan pada bentuk partisipasi masyarakat, sedangkan penelitian ini lebih fokus terhadap pembangunan desa</p>

					masyarakat dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Program ini juga dapat dikatakan membawa perubahan yang positif baik dari segi lingkungan, pembangunan manusia dan perihal pemberdayaan masyarakat.	
--	--	--	--	--	---	--

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Efektifitas

Efektifitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Efektifitas disebut juga efektif, apabila tercapainya suatu tujuan atau sasaran yang telah ditemukan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Soewarno yang mengatakan bahwa efektifitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Caster I. Bernard, efektifitas adalah tercapainya sasaran yang telah disepakati bersama (Bernard, 1992:207).

Menurut Chambers (1998), pengukuran efektifitas secara umum dan yang paling menonjol adalah :

1. Keberhasilan program
2. Keberhasilan sasaran
3. Kepuasan terhadap program
4. Tingkat *input* dan *output*
5. Pencapaian tujuan menyeluruh (Chambers, 1998:121)

Sehingga efektifitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya (Chambers, 1998:47)

Sementara itu, menurut Richard M. Steers, efektifitas merupakan tingkat kemampuan organisasi untuk dapat melaksanakan seluruh tugas-tugas pokoknya atau pencapaian sasarannya. Efektifitas dalam dunia riset ilmu-ilmu sosial dijabarkan dengan penemuan atau produktifitas, dimana bagi sejumlah sarjana sosial efektivitas sering ditinjau dari sudut kualitas pekerjaan atau program kerja. Dari pendapat beberapa ahli di atas dapat disimpulkan pengertian efektifitas, yaitu keberhasilan suatu aktivitas atau kegiatan dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Mengingat keanekaragaman pendapat mengenai sifat dan komposisi dari efektifitas, maka tidaklah mengherankan terdapat sekian banyak pertentangan pendapat sehubungan dengan cara meningkatnya, cara mengatur dan bahkan cara menentukan indikator efektifitas. Sehingga, dengan demikian akan lebih sulit lagi bagaimana cara mengevaluasi tentang efektifitas.

Pengertian yang memadai mengenai tujuan ataupun sasaran organisasi, merupakan langkah pertama dalam pembahasan efektifitas, dimana seringkali berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam usaha mengukur efektifitas yang pertama sekali adalah memberikan konsep tentang efektifitas itu sendiri. Dari beberapa uraian diatas, dapat dijelaskan bahwa efektifitas merupakan kemampuan untuk melaksanakan aktifitas-aktifitas suatu lembaga secara fisik dan non fisik untuk mencapai tujuan serta meraih keberhasilan maksimal.

2.2.1.2 Pendekatan Terhadap Efektifitas

Pendekatan efektifitas dilakukan dengan acuan berbagai bagian yang berbeda dari lembaga, dimana lembaga mendapatkan input atau masukan berupa

berbagai macam sumber dari lingkungannya. Kegiatan dan proses internal yang terjadi dalam lembaga mengubah input menjadi output atau program yang kemudian dilemparkan kembali pada lingkungannya.

1. Pendekatan sasaran (*Goal Approach*)

Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektifitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut (Price, 1972:15). Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektifitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkannya dengan memusatkan perhatian terhadap akses *output* yaitu dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat output yang direncanakan. Dengan demikian, pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi atau lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai.

2. Pendekatan Sumber (*System Resource Approach*)

Pendekatan sumber mengukur efektifitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Suatu lembaga harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan system agar dapat menjadi efektif. Pendekatan ini didasarkan pada

teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dalam lingkungannya dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkali bersifat langka dan bernilai tinggi.

3. Pendekatan Proses (*Internal Process Approach*)

Pendekatan proses menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga.

2.2.1.3 Masalah dalam Pengukuran Efektifitas

Efektifitas selalu diukur berdasarkan prestasi, produktivitas dan laba. Seperti ada beberapa rancangan tentang memandang konsep ini dalam kerangka kerja dimensi satu, yang memusatkan perhatian hanya kepada satu kriteria evaluasi. Pengukuran efektifitas dengan menggunakan sasaran yang sebenarnya dan memberikan hasil daripada pengukuran efektifitas berdasarkan sasaran resmi dengan memperhatikan masalah yang ditimbulkan oleh beberapa hal berikut:

1. Adanya macam-macam *output*

Adanya macam-macam output yang dihasilkan menyebabkan pengukuran efektifitas dengan pendekatan sasaran menjadi sulit untuk dilakukan.

Pengukuran juga semakin sulit untuk dilakukan. Pengukuran juga semakin sulit jika ada sasaran yang saling bertentangan dengan sasaran lainnya. Efektifitas tidak akan dapat diukur hanya dengan menggunakan suatu indikator atau efektifitas yang tinggi pada suatu sasaran yang seringkali disertai dengan efektifitas yang rendah pada sasaran lainnya. Selain itu, masalah itu juga muncul karena adanya bagian-bagian dalam suatu lembaga yang mempunyai sasaran berbeda-beda secara keseluruhan, sehingga pengukuran efektifitas seringkali terpaksa dilakukan dengan memperhatikan bermacam-macam secara simultan. Dengan demikian, yang diperoleh dari pengukuran efektifitas adalah profil atau bentuk dari efek yang menunjukkan ukuran efektifitas pada setiap sasaran yang dimilikinya. Selanjutnya hal lain yang sering dipermasalahkan adalah frekuensi penggunaan kriteria dalam pengukuran efektifitas seperti yang dikemukakan oleh R.M. Steers yaitu bahwa kriteria dan penggunaan hal-hal tersebut dalam pengukuran efektifitas adalah:

- a. Adaptabilitas dan Fleksibilitas
 - b. Produktifitas
 - c. Keberhasilan
 - d. Keterbukaan dalam berkomunikasi
 - e. Keberhasilan pencapaian program
 - f. Pengembangan program (Steers, 1985:546)
2. Subjektifitas dalam adanya penelitian

Pengukuran efektifitas dengan menggunakan sasaran seringkali mengalami hambatan, karena sulitnya mengidentifikasi sasaran yang

sebenarnya dan juga karena kesulitan dalam mencapai sasaran. Hal ini karena sasaran yang sebenarnya dalam pelaksanaan. Untuk itu ada baiknya bila meninjau pendapat G.W. England, bahwa perlu masuk kedalam suatu lembaga untuk mempelajari sasaran yang sebenarnya karena informasi yang diperoleh hanya dari dalam suatu lembaga untuk melihat program yang berorientasi ke luar atau masyarakat, seringkali dipengaruhi oleh subjektifitas. Untuk sasaran yang dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, unsure subjektif itu tidak berpengaruh tetapi untuk sasaran yang harus dideskripsikan secara kuantitatif, informasi yang diperoleh akan sangat tergantung pada subjektifitas dalam suatu lembaga mengenai sasarannya. Hal ini didukung oleh pendapat Richard M. Steers yaitu bahwa lingkungan dan keseluruhan elemen-elemen kontekstual berpengaruh terhadap informasi lembaga dan menentukan tercapai tidaknya sasaran yang hendak dicapai (Steers, 1985:558).

2.2.2 Pengertian PNPM Mandiri

PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri (Pedoman Umum PNPM Mandiri, 2007) :

1. PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong

prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

2. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu atau berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

2.2.2.1 Tujuan umum

PNPM Mandiri bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.

2.2.2.2 Tujuan Khusus

1. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan
2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel

3. Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin.
4. Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah, daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok perduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
5. Meningkatnya keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas dari pemerintah daerah dan kelompok perduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.
6. Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal
7. Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat

2.2.2.3 Prinsip Dasar dan Pendekatan PNPM Mandiri

PNPM Mandiri menekankan pada prinsip-prinsip dasar sebagai berikut :

1. Bertumpu pada pembangunan manusia, Pelaksanaan PNPM Mandiri senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya
2. Otonomi, Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri, masyarakat memiliki kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola.

3. Desentralisasi, Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah atau masyarakat sesuai dengan kapasitasnya.
4. Berorientasi pada masyarakat miskin, Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung.
5. Partisipasi, Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong royong menjalankan pembangunan
6. Kesenjangan dan keadilan gender, Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil dan manfaat kegiatan pembangunan
7. Demokratis, Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin
8. Transparansi dan Akuntabel, Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggung jawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administratif.
9. Prioritas, Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumber daya yang terbatas.

10. Kolaborasi, Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerja sama dan sinergi antar pemangku kepentingan dan penanggulangan kemiskinan.
11. Keberlanjutan, Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya saat ini tapi juga di masa depan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
12. Sederhana, Semua aturan, mekanisme, dan prosedur dalam pelaksanaan PNPM Mandiri harus sederhana, fleksibel, mudah dipahami, mudah dikelola serta dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat.

PNPM Mandiri melakukan pendekatan atau upaya-upaya rasional dalam mencapai tujuan program dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan program adalah pembangunan yang berbasis masyarakat dengan :

1. Menggunakan kecamatan sebagai lokus program untuk mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program.
2. Memposisikan masyarakat sebagai penentu atau pengambil kebijakan dan pelaku utama pembangunan pada tingkat lokal.
3. Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses pembangunan partisipatif
4. Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya, dan geografis.

5. Melalui proses pemberdayaan yang terdiri atas pembelajaran, kemandirian, dan berkelanjutan

2.2.2.4 Dasar Hukum PNPM Mandiri

Dasar hukum pelaksanaan PNPM Mandiri mengacu pada konstitusional UUD 1945 beserta amandemennya, landasan idiil Pancasila, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta landasan khusus pelaksanaan PNPM Mandiri. Peraturan perundang-undangan khususnya terkait sistem pemerintahan, perencanaan, keuangan negara, dan kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut :

1. Dasar peraturan perundangan sistem pemerintahan yang digunakan adalah;
 - a. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - b. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa.
 - c. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.
 - d. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan.

2. Sistem Perencanaan, dasar peraturan perundangan yang terkait yaitu:
 - a. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Nasional 2005-2009

- b. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009.
 - c. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
 - d. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
 - e. Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 tentang pengaruh Gender dalam Pembangunan Nasional
3. Sistem Keuangan Negara, dasar peraturan perundangan yang terkait yaitu:
- a. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 - b. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 - c. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Peimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 - d. Peraturan pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

2.2.3 Pengertian Desa

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan yang terutama yang tergantung pada sektor pertanian. Pengertian Desa secara umum lebih sering dikaitkan dengan pertanian. Misalnya, Bergel (1955:121), mendefinisikan desa sebagai “setiap

pemukiman para petani (*peasants*)“. Sebenarnya, faktor pertanian bukanlah ciri yang harus melekat pada setiap desa. Ciri utama yang terletak pada setiap desa adalah fungsinya sebagai tempat tinggal (menetap) dari suatu kelompok masyarakat yang relatif kecil. Sementara itu Koentjaraningrat (1977) memberikan pengertian tentang desa melalui pemilahan pengertian komunitas dalam dua jenis, yaitu komunitas besar dan komunitas kecil. Dalam hal ini Koentjaraningrat mendefinisikan desa sebagai “*komunitas kecil yang menetap tetap di suatu tempat*”(1977:162). Koentjaraningrat tidak memberikan penegasan bahwa komunitas desa secara khusus tergantung pada sektor pertanian. Dengan kata lain artinya bahwa masyarakat desa sebagai sebuah komunitas kecil itu dapat saja memiliki ciri-ciri aktivitas ekonomi yang beragam, tidak disektor pertanian saja. Selanjutnya, menurut Paul H. Landis (1948:12-13) seorang sarjana sosiologi pedesaan dari Amerika Serikat, mengemukakan definisi tentang desa dengan cara membuat tiga pemilahan berdasarkan pada tujuan analisis. Untuk tujuan analistik, desa didefinisikan sebagai lingkungan yang penduduknya kurang dari 2500 orang. Untuk tujuan analisa sosial-psikologi, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan yang akrab dan serba informal diantara sesama warganya. Sedangkan untuk tujuan analisa ekonomi, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya tergantung kepada pertanian.

Bertolak dari kenyataan umum maupun secara teoritis, untuk memahami pengertian tentang desa tampaknya juga tidak dapat mengabaikan perspektif evolusi. Dalam hal ini konsep-konsep desa, kota kecil dan kota besar sering dilihat sebagai gejala yang berkaitan satu sama lain dalam bentuk suatu jaringan atau pola tertentu dalam proses kontinuitas perubahan. Berikut ini Bergel (1955:121-

135) memberikan gambaran yang cukup sistematis tentang hal dimaksud. Menurut Bergel istilah desa dapat diterapkan untuk dua pengertian. Pertama, desa diartikan sebagai setiap pemukiman para petani, terlepas dari ukuran besar-kecilnya. Kedua, terdapat juga desa-desa perdagangan. Yang dimaksud desa perdagangan tidak berarti bahwa seluruh penduduk desa terlibat dalam kegiatan perdagangan, melainkan hanya sejumlah orang saja dari desa itu yang memiliki mata pencaharian dalam bidang perdagangan. Sementara itu ada upaya untuk menjelaskan pengertian desa melalui cara membandingkan karakteristik kota sebagaimana dikemukakan Roucek dan Warren (1962) dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2 Perbandingan Karakteristik Desa dan Kota

Karakteristik Desa	Karakteristik Kota
1. Besarnya peranan kelompok primer	1. Besarnya peranan kelompok sekunder
2. Faktor geografik yang menentukan sebagai dasar pembentukan kelompok atau asosiasi	2. Hubungan antara orang satu dengan yang lain didasarkan atas kepentingan daripada kedaerahan
3. Hubungan lebih bersifat gotong royong	3. Individual tinggi pada setiap lapisan masyarakat
4. Mobilitas sosial rendah	4. Tergantung pada spesialisasi
5. Populasi anak dalam porsi yang lebih besar	5. Heterogen

Sumber : Hasil olahan peneliti mengacu UU No. 72 Tahun 2005

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan pengertian desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

2.2.4. Pembangunan Desa

Pembangunan desa pada hakikatnya adalah segala bentuk aktivitas manusia (masyarakat dan pemerintah) di desa dalam membangun diri, keluarga, masyarakat dan lingkungan di wilayah desa baik yang bersifat fisik, ekonomi, sosial, budaya, politik, ketertiban, pertahanan, keamanan, agama, dan pemerintahan yang dilakukan secara terencana dan membawa dampak positif terhadap kemajuan desa (Chambers, 1998). Dengan demikian, pembangunan desa sesungguhnya merupakan upaya-upaya sadar dari masyarakat dan pemerintah baik dengan menggunakan sumberdaya yang bersumber dari desa, bantuan pemerintah, maupun bantuan organisasi-organisasi untuk menciptakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan-perubahan yang dilakukan manusia pada awalnya didorong oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Semakin maju suatu peradaban dan semakin kompleksnya kebutuhan hidup manusia akan mendorong umat manusia menggunakan kecerdasannya untuk melakukan upaya-upaya tertentu guna pemenuhan kebutuhannya. Upaya-upaya tersebut ditujukan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dalam pemenuhan

kebutuhan. Berbicara tentang pembangunan desa terdapat dua aspek penting yang menjadi objek pembangunan. Secara umum, pembangunan desa terdapat dua aspek utama, yaitu:

1. Pembangunan desa dalam aspek fisik, yaitu pembangunan yang objek utamanya dalam aspek fisik (sarana, prasarana, dan manusia) di pedesaan seperti jalan desa, bangunan rumah, pemukiman, jembatan, bendungan, irigasi, sarana ibadah, pendidikan (*hardware* berupa sarana dan prasarana pendidikan, dan *software* berupa segala bentuk pengaturan, kurikulum dan metode pembelajaran), keolahragaan dan sebagainya. Pembangunan dalam aspek fisik ini selanjutnya disebut Pembangunan Desa.
2. Pembangunan dalam aspek pemberdayaan insane, yaitu pembangunan yang objek utamanya aspek pengembangan dan peningkatan kemampuan, *skill* dan memberdayakan masyarakat di daerah pedesaan sebagai warga negara, seperti pendidikan dan pelatihan, pembinaan usaha ekonomi, kesehatan, spiritual, dan sebagainya. Tujuan utamanya adalah untuk membantu masyarakat yang masih tergolong marjinal agar dapat melepaskan diri dari berbagai belenggu keterbelakangan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Pembangunan dalam aspek pemberdayaan insani ini selanjutnya.

Pembangunan desa bukan hal baru lagi di Indonesia ini, pembangunan desa bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Dalam proyek-proyek yang dilakukan oleh pemerintah dalam pembangunan masyarakat, dalam penelitian ini konsep pembangunan dari PNPM Mandiri perdesaan dapat dirasakan oleh masyarakat desa. Hasil dari

pembangunan desa yang berupa pembangunan fisik yang telah dilakukan dapat dirasakan masyarakat, bukan hanya kelompok-kelompok tertentu saja yang merasakan hasil dari proyek tersebut. Dalam pembangunan desa dilakukan usaha yang intensif dengan tujuan dan kecenderungan memberikan fokus perhatian kepada kelompok maupun daerah tertentu melalui penyampaian pelayanan, bantuan, dan informasi kepada masyarakat desa (Poostchi, 1986). Dengan demikian, strategi ini lebih banyak menaruh perhatian pada proses penyampaian daripada mengembangkan kapasitas dan respon masyarakat. Karena masyarakat desa banyak aspek, usaha pembangunan desa bersifat menyeluruh semestinya juga meliputi keseluruhan aspek tersebut. Apabila usaha pembangunan untuk masing-masing aspek ditangani oleh instansi yang berbeda, akan dijumpai instansi yang melakukan aktivitas desa dalam rangka melaksanakan programnya masing-masing. Untuk menghindari duplikasi dan tumpang tindih serta untuk mewujudkan proses yang saling mendukung, maka perlu dilakukan pendekatan yang mampu mengkoordinasikan dan mensinergikan program-program yang bersifat sektoral tersebut, untuk maksud tersebut kemudian dikembangkan strategi yang kemudian dikenal sebagai pembangunan desa terpadu.

2.2.3.2 Teori Pembangunan (Teori Modernisasi)

1. Teori Harrod-Domar

Salah satu teori ekonomi pembangunan yang sampai sekarang masih terus dipakai, meskipun sudah dikembangkan secara canggih. Kedua ahli ekonomi ini, yang bekerja secara terpisah, mencapai kesimpulan yang sama, yakni bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi rendah,

pertumbuhan ekonomi masyarakat atau negara tersebut juga akan rendah. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi, tabungan dan investasi ini kemudian dirumuskan dalam rumus Harrod-Domar yang sangat terkenal di kalangan para ahli ekonomi pembangunan. Seperti dikatakan diatas, teori ini sudah banyak mengalami modifikasi, sehingga menjadi lebih canggih. Tetapi pada intinya, rumus pembangunan Harrod-Domar ini masih dipertahankan. Rumus ini didasarkan pada asumsi bahwa masalah pembangunan pada dasarnya merupakan masalah menambahkan investasi modal. Masalah keterbelakangan adalah masalah kekurangan modal. Kalau ada modal, dan modal itu diinvestasikan, hasilnya adalah pembangunan ekonomi. Seperti yang dikatakan oleh Blomstrom dan Hettne :

“Melihat perbedaan yang tampak antara negara-negara macam-macam aspek dari keterbelakangan. Persoalan industri dan usaha untuk menggambarkan tingkat dan keterbelakangan kemudian dirumuskan sebagai masalah kekurangan, yakni kekurangan modal”

Karena itu, berdasarkan pada model ini, resep para ahli ekonomi pembangunan di negara-negara Dunia Ketiga untuk memecahkan persoalan keterbelakangan adalah dengan mencari tambahan modal, baik dari dalam negeri (dengan mengusahakan peningkatan tabungan dalam negeri), maupun dari luar negeri (melalui penanaman modal dan utang luar negeri).(Budiman, 1995 : 18-19)

2. W.W Rostow: Lima Tahap Pembangunan

Berbeda dengan kedua ahli sebelumnya, Rostow adalah seorang ahli ekonomi. Tetapi perhatiannya tidak terbatas pada masalah ekonomi dalam arti sempit. Perhatiannya meluas sampai pada masalah sosiologi dalam proses

pembangunan, meskipun titik berat analisisnya masih tetap pada masalah ekonomi. Dalam bukunya yang terkenal, *The Stages of Economic Growth, A Non-Communist Manifesto* yang mula-mula terbit pada tahun 1960, dia menguraikan teorinya tentang proses pembangunan dalam sebuah masyarakat. Seperti juga para ahli ekonomi umumnya pada jaman itu, bagi Rostow pembangunan merupakan proses bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat yang terbelakang ke masyarakat yang maju. Proses ini, dengan berbagai variasinya, pada dasarnya berlangsung sama dimanapun dan kapanpun juga. Variasi yang ada bukanlah merupakan perubahan yang mendasar dari proses ini, melainkan hanya berlangsung di permukaan saja. Rostow membagi proses pembangunan ini menjadi lima tahap yaitu:

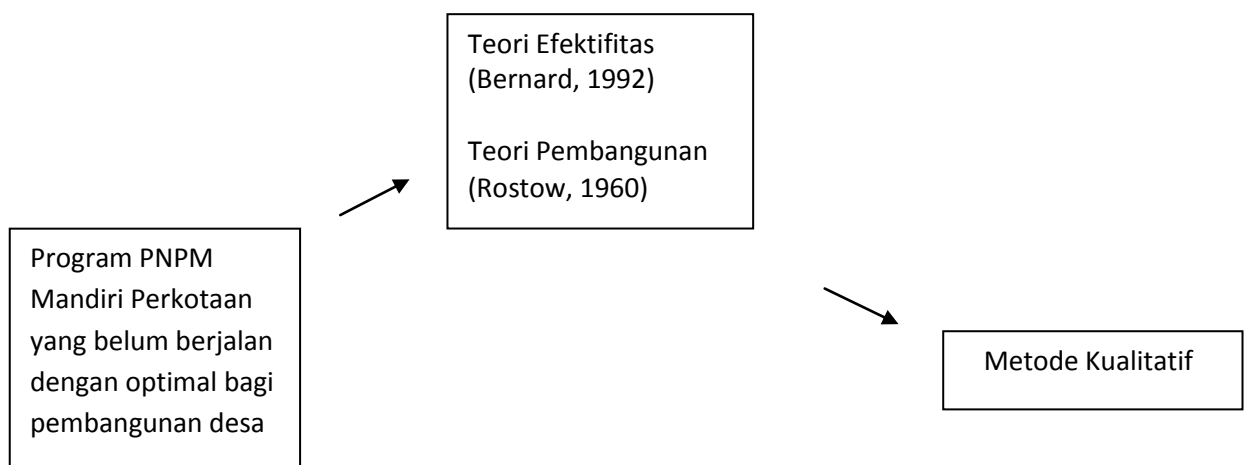
- a. Masyarakat tradisional.
- b. Prakondisi untuk lepas landas
- c. Lepas landas
- d. Bergerak ke kedewasaan
- e. Jaman konsumsi Masal yang tinggi

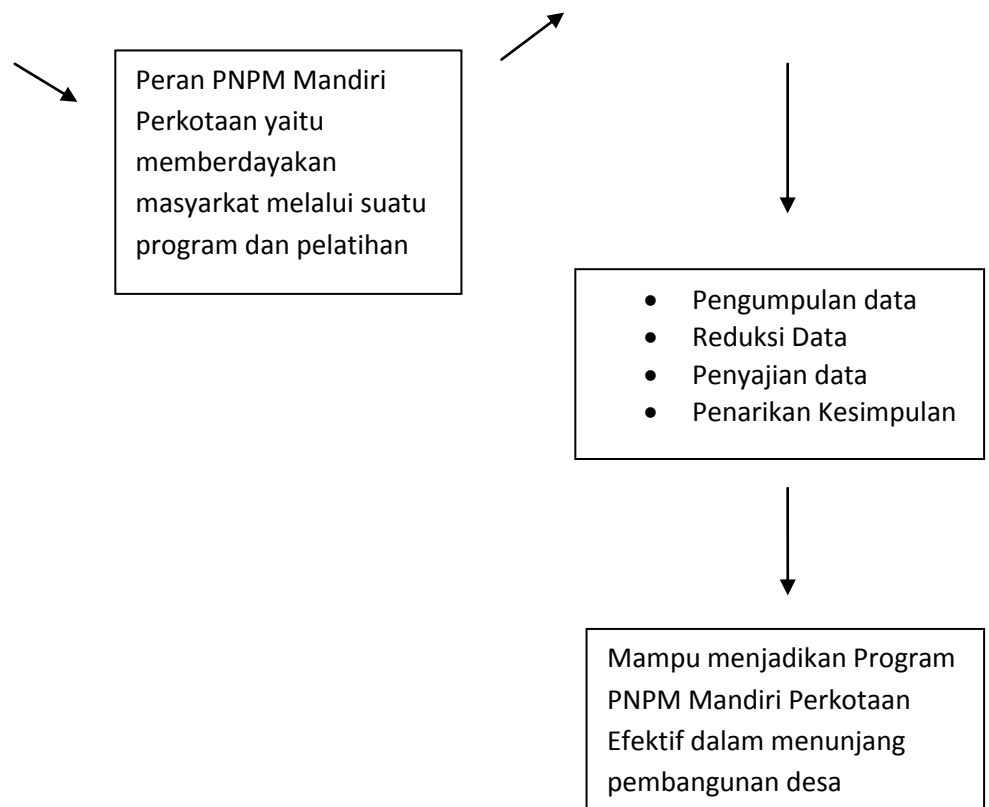
3. Alek Inkeles dan David H. Smith: Manusia Modern

Aleks Inkeles dan David Smith pada dasarnya juga berbicara tentang pentingnya faktor manusia sebagai komponen penting penopang pembangunan. Pembangunan bukan sekedar perkara pemasokan modal dan teknologi saja. Tetapi dibutuhkan manusia yang dapat mengembangkan sarana material tersebut supaya menjadi produktif. Untuk ini, dibutuhkan apa yang disebut oleh Inkeles sebagai

manusia modern. Dari hasil penelitiannya Inkeles dan Smith menjumpai bahwa memang pendidikan adalah yang paling efektif untuk mengubah manusia. Dampak pendidikan tiga kali lebih kuat dibandingkan dengan usaha-usaha lainnya.

2.3. Alur Kerangka Penelitian





Sumber : Hasil observasi yang diolah, 2014

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta menurut Moleong (2007:31). Hasil penelitiannya ditekankan pada memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diselidiki. Penelitian kualitatif dapat diartikan mengeksplorasi pengalaman subjektif orang, dan makna yang mereka hubungkan dengan pengalaman-pengalaman tersebut. Wawancara intensif, memungkinkan orang untuk berbicara bebas dan memberikan tafsiran terhadap suatu peristiwa. Sudut pandang merekalah yang paling penting.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini memilih lokasi di Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Hal ini disebabkan daerah ini dipandang menarik untuk diteliti karena terdapat suatu permasalahan dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri.

3.3 Fokus Penelitian

Untuk mempertegas dan membatasi ruang lingkup dan fokus penelitian, maka peneliti memberikan fokus sebagai berikut :

3.3.1. Efektifitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi, dalam hal ini efektifitas PNPM Mandiri Perkotaan adalah melalui Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan program pembangunan infrastruktur desa

3.3.2. Faktor pendukung dipahami sebagai kondisi yang memperkuat efektifitas PNPM Mandiri Perkotaan dalam menunjang pembangunan desa, sedangkan faktor penghambat dipahami sebagai hambatan-hambatan efektifitas program PNPM Mandiri Perkotaan dalam menunjang pembangunan desa

3.4 Penentuan informan

Sugiyono (2009: 221) mengemukakan bahwa penentuan sampel atau informan dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, karena itu orang yang dijadikan sampel atau informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Mereka menguasai atau memahami kegiatan, yang dalam penelitian ini adalah kordinator PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo
2. Mereka yang terlibat kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan
3. Mereka cukup waktu untuk diwawancarai.

3.5 Jenis dan Sumber Data

3.5.1. Data primer

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data menurut Sugiyono (2010: 156). Data-data primer ini berupa data-data dari *key* informan dan informan (Kepala Desa Buduran dan Pemegang kendali Program PNPM Perkotaan) Catatan hasil observasi dan hasil wawancara selama di lapangan

3.5.2 Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang sudah tersedia, sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen menurut Sugiyono (2010: 156). Dalam hal ini data-data yang diperoleh peneliti berupa buku tentang pembangunan desa, buku tentang pembangunan dan arsip-arsip yang dimiliki oleh Desa Buduran dalam program PNPM Mandiri Perkotaan.

3.6 Penentuan Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi (Sugiyono, 2012: 63).

1. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi merupakan salah satu metode untuk menyimpulkan data, dalam hal ini penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian untuk kemudian data yang diperoleh digunakan sebagai acuan untuk menarik kesimpulan.

2. Wawancara (*interview*).

Menurut Sugiyono wawancara adalah percakapan antara dua orang yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu (Herdiansyah, 2010: 118). Dalam hal ini wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut antara lain: (1) pewawancara, (2) informan, (3) topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan, (4) situasi wawancara

3. Dokumentasi

Menurut Louis Gottschalk (1986: 38) dalam sarjanaku 2013, dokumentasi seringkali digunakan para ahli dalam dua pengertian, yaitu pertama, berarti sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan daripada kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan terlukis, dan petilasan-petilasan arkeologis. Pengertian kedua, diperuntukan bagi surat-surat resmi dan surat-surat negara seperti surat perjanjian, undang-undang, hibah, konsesi, dan lainnya. Lebih lanjut, Gottschalk menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang berupa tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.

4. Kepustakaan

Penulis mengambil beberapa data teori atau pendapat dari para ahli/pakar sebagai dasar landasan teori dan tinjauan pustaka

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini digambarkan deskripsi tentang Efektifitas Program PNPM Mandiri Perkotaan melalui uraian narasi yang menunjukkan permasalahan yang dibahas. Hasil wawancara juga disusun untuk mengetahui kategori tertentu, atau pokok permasalahan tertentu yang menunjuk pada permasalahan penelitian (Moleong dalam Sugiyono, 2000). Untuk selanjutnya dilakukan dilakukan interpretasi deskriptif dengan mengacu pada landasan teoritik yang digunakan.

BAB IV

PENGANALISISAN DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Keadaan Geografis

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pertimbangan bahwa Desa Buduran memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan desa-desa lainnya di Kabupaten Sidoarjo. Agar dalam pembahasan diperoleh hasil yang komprehensif maka perlu kiranya dijelaskan tentang kondisi lokasi penelitian secara umum yang selanjutnya akan menjadi landasan dalam pembahasan-pembahasan berikutnya.

Desa Buduran merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Terletak di barat di JL. Balai Desa Barat terletak 3km arah ke selatan dari pusat pemerintahan Kabupaten Sidoarjo yang berbatasan dengan wilayah-wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara : Desa Banjar Kemantren dan Desa Wadung Asih
2. Sebelah selatan : Desa Siwalan Panji dan Desa Sidokerto
3. Sebelah Timur : Desa Sidomulyo dan Desa Siwalan Panji
4. Sebelah Barat : Desa Sukorejo dan Desa Sidokerto

Dari batas wilayah diatas, Desa Buduran, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo memiliki luas wilayah 91,40 Ha dan jumlah penduduk sebanyak 2618 jiwa, dengan pembagian menjadi 17 RT yang terbagi dalam 5 RW. Dengan pembagian luas pemukiman 67,30 Ha untuk lahan pemukiman, 3,00 Ha untuk lahan persawahan, 0,40 Ha untuk lahan pemakaman, 0,05 Ha untuk lahan geografis sebagai berikut:

Tabel 4.1: Kondisi Geografis Desa Buduran, Kecamatan Buduran

No	Keterangan	Spesifikasi
1	Ketinggian dari permukaan laut	0,00 mdl
2	Curah hujan	2.000,00 mm
3	Topografi (Dataran rendah, tinggi, pantai)	Dataran rendah
4	Suhu udara rata-rata	33 C

Sumber: Data Monografi Desa Buduran Tahun 2013

Dengan melihat tabel diatas dapat diketahui bahwa Desa Buduran, Kecamatan Buduran merupakan termasuk dataran rendah dengan suhu rata-rata 33 derajat *celcius* serta curah hujan yang mencapai 2000 mm/tahun. Serta curah hujan normal iklim tropis, yaitu 6 bulan basah dan 6 bulan kering.

4.1.2 Kondisi Demografis

Desa Buduran, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo memiliki jumlah penduduk sebanyak 5235 jiwa.

Jumlah penduduk menurut usia, yang dibagi dalam dua kelompok yaitu, kelompok pendidikan dan menurut kelompok mata pencaharian. Yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4.2: Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	TK	50
2	SD	1131
3	SMP	741
4	SMA	1892
5	D1/D2/D3	110
6	S1/S2/S3	479

Sumber: Data Monografi Desa Buduran Tahun 2013

Dengan melihat tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Buduran yang paling tinggi adalah tingkat SMA dengan jumlah 1892 jiwa kemudian tingkat SD dengan jumlah 1131 jiwa.

Dan dari jumlah tersebut bekerja di berbagai bidang pekerjaan antara lain:

Tabel 4.3: Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
1	Karyawan	1726
2	Pegawai Negeri Sipil	105
3	Wiraswasta/Pedagang	191
4	Buruh Tani	1
5	Pensiunan	86
6	Pembantu Rumah Tangga	10
7	TNI/POLRI	59

Sumber: Data Monografi Desa Buduran Tahun 2013

Dari data tabel diatas dapat diuraikan bahwa mata pencaharian karyawan lebih besar dibandingkan dengan mata pencaharian yang lain, sebesar 1726 jiwa.

Dari sektor ini di dalamnya termasuk karyawan perusahaan pemerintah dan karyawan swasta. PNS sebanyak 105 jiwa, wiraswasta/pedagang sebanyak 191 jiwa, buruh tani sebanyak 1 jiwa, pensiunan sebanyak 86 jiwa, pembantu rumah tangga sebanyak 10 jiwa dan TNI/POLRI sebanyak 59 jiwa.

Apabila ditinjau dari segi agama, warga Desa Buduran, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo ini terdiri dari berbagai pemeluk agama, antara lain tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 4.4: Jumlah penduduk menurut agama

NO	AGAMA	JUMLAH
1	Islam	2458
2	Kristen	211
3	Khatolik	83
4	Hindu	7
5	Budha	8

Sumber: Data Monografi Desa Buduran Tahun 2013

Dari melihat tabel diatas dapat diketahui jumlah pemeluk agama islam paling banyak di Desa Buduran, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo yaitu 2458 jiwa, Kristen sebanyak 211 jiwa, Khatolik sebanyak 83 jiwa, Hindu sebanyak 7 jiwa dan Budha sebanyak 8 jiwa.

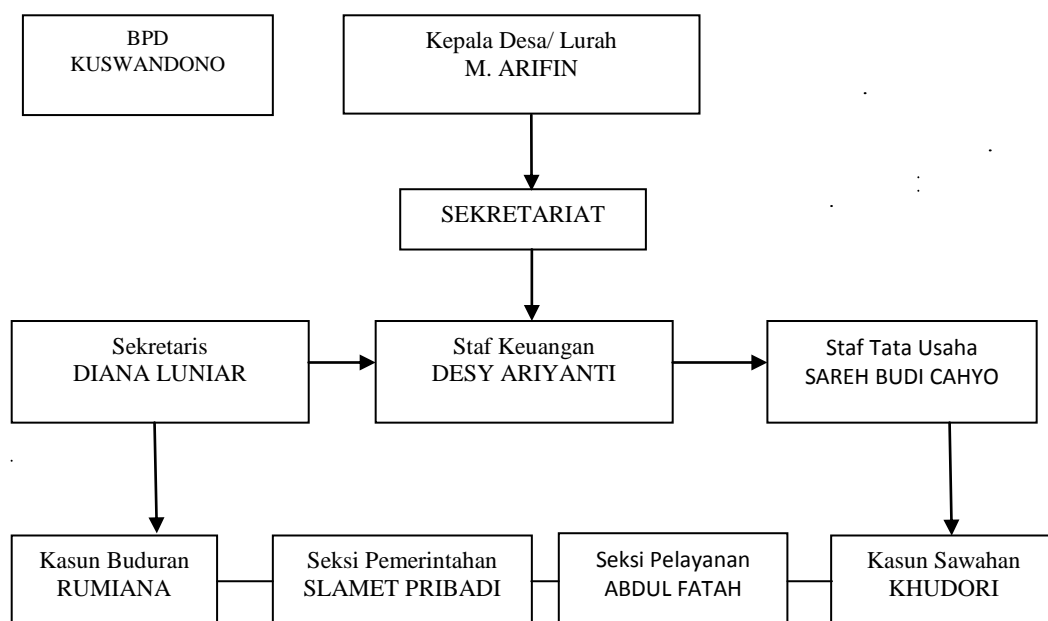
4.1.3 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Buduran

Pemerintahan Desa Buduran masih memakai pola kepemimpinan Kepala Desa, yaitu pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dipilih langsung oleh warganya. Selain itu juga terdapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Keswadayaan masyarakat (LKM) yang mempunyai

hubungan koordinatif Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan desa. Dalam menjalankan pemerintahannya Kepala Desa Buduran dibantu oleh Sekretaris Desa beserta staf-stafnya, dan juga mengkomandoi 17 RT dan 5 RW.

Berikut adalah gambar struktur organisasi pemerintahan Desa Buduran:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Desa Buduran



Sumber : Data Monografi Desa Buduran Tahun 2013

4.1.4 Profil PNPM Mandiri Perkotaan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan atau disingkat PNPM Mandiri Perkotaan merupakan program yang didirikan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat desa di dalam suatu lingkup perkotaan yang dikelola secara otonom oleh masyarakat desa sebagai tindak lanjut dari realisasi PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Sidoarjo. Dengan melalui

musyawarah desa dan ditetapkan oleh keputusan Kepala Desa, maka dibentuk satu pengurus yang bertugas sebagai pengelola dan penanggung jawab PNPM Mandiri Perkotaan Desa Buduran.

4.1.4.1 Visi dan Misi

Visi dari PNPM Mandiri Perkotaan adalah “Memberdayakan masyarakat desa melalui program-program pengembangan kemampuan melalui bantuan modal, pelatihan ketrampilan dan kursus”.

Sedangkan Misi dari PNPM Mandiri Perkotaan Desa Buduran Kecamatan Buduran yaitu :

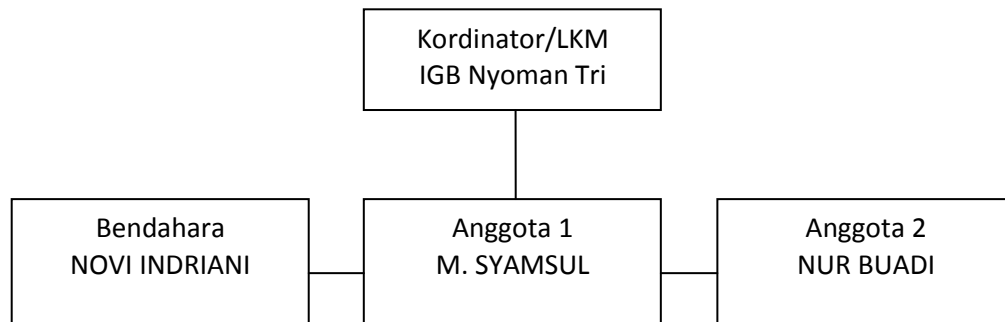
- a.) Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya
- b.) Pengembangan infrastruktur dasar pedesaan yang mendukung perekonomian desa
- c.) Pengembangan usaha ekonomi desa
- d.) Mengelola dana program yang masuk desa yang bersifat dana bergulir terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi desa.

4.1.4.2 Struktur Organisasi PNPM Mandiri Perkotaan Desa Buduran

Gambar 4.2

Struktur Organisasi PNPM Mandiri Perkotaan Desa Buduran





Sumber : Hasil wawancara, diolah, 6 Mei 2014

Dalam anggaran dasar PNPM Mandiri Perkotaan, tugas dan tanggung jawab pengurus adalah sebagai berikut:

a.) Kordinator

1. Memimpin dan mengkoordinasi program
2. Membahas dan menetapkan kelayakan program yang akan dijalankan dalam pelaksanaan pembangunan desa
3. Melakukan kuasa pemindahbukuan simpanan beku ke rekening lain yang disepakati oleh pelindung dalam hal ini Kepala Desa sebagai pemegang tinggi struktur organisasi
4. Melakukan pengendalian kegiatan dan pembinaan masyarakat desa dalam kaitan program pemberdayaan masyarakat
5. Bertindak atas nama lembaga untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga ataupun pihak-pihak yang terkait
6. Melaporkan neraca keuangan setiap akhir tahun melalui musyawarah desa

b.) Bendahara

1. Menerima, menyimpan, dan membayarkan uang berdasarkan bukti-bukti yang sah
2. Membantu ketua dalam membahas dan memutuskan permohonan dana yang layak direalisasikan
3. Melaporkan laporan keuangan kepada pelindung untuk kemudian dipertanggung jawabkan pada musyawarah desa
4. Menyelenggarakan Pembukuan Keuangan secara sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan menunjukkan kondisi keuangan sesungguhnya

4.1.5 Karakteristik Informan

Sasaran dalam penelitian “Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Dalam Menunjang Pembangunan Desa (Studi di Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo)” adalah meliputi pengurus PNPM Mandiri Perkotaan Desa Buduran; yaitu kordinator sekaligus ketua (Bapak Nyoman), bendahara (Ibu Novi), kepala desa (Bapak Arifin), perangkat desa (Ibu Ana) dan masyarakat penerima bantuan program PNPM Mandiri Perkotaan.

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong, 2005). Berikut adalah daftar informan yang berhasil diwawancarai peneliti:

Tabel 4.5
Daftar Informan

Jabatan	Laki-laki	Perempuan
Pengurus PNPM Mandiri Perkotaan	1	1
Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	1
Masyarakat Umum	1	3

Sumber : Hasil wawancara, diolah 7 Mei 2014

Pengurus PNPM Mandiri Perkotaan Desa Buduran yaitu kordinator, bendahara dan anggota merupakan informan kunci (*key informan*) karena merekalah selaku pelaksana yang bertanggung jawab dalam seluruh kegiatan yang di Desa Buduran. Sedangkan data-data pendukung dan sumber-sumber informasi yang berkaitan dengan efektifitas program PNPM Mandiri Perkotaan dalam menunjang pembangunan di Desa Buduran digali melalui kepala desa, perangkat desa, anggota PNPM dan masyarakat umum.

4.2 Temuan Hasil Penelitian

4.2.1 Efektifitas PNPM Mandiri Perkotaan Dalam Menunjang Pembangunan Di Desa Buduran

Pembangunan desa merupakan cara dan pendekatan pembangunan yang diprogramkan Negara secara sentralistik. Dimana pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan sebagian atau seluruh sumber daya (biaya,

material, sumber daya manusia) bersumber dari pemerintah (pusat atau daerah), selain itu dapat pula berupa sebagian atau seluruh sumber daya bersumber dari desa. Pembangunan bisa berjalan dengan optimal apabila pemerintah turut andil dalam kegiatan pembangunan ini. Program-program pemerintah diperlukan sebagai perencanaan pembangunan yang partisipatif. Oleh sebab itu salah satu alternatif pemecahan masalah efektifitas pembangunan desa adalah perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui program PNPM Mandiri Perkotaan yang ada di desa Buduran sebagai bentuk kemandirian dan kreatifitas yang ditempuh melalui suatu program-program keahlian khusus yang dilakukan oleh mereka sendiri.

Salah satu bentuk program PNPM Mandiri Perkotaan yang ada di Desa Buduran adalah peningkatan kualitas dan pendidikan bagi warga yang kurang mampu, serta beberapa program lainnya yang turut andil dalam pembangunan desa. PNPM Mandiri perkotaan merupakan program pemerintah yang ada di Desa Buduran sejak tahun 2009 yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam memberdayakan potensi masyarakat desa dalam hal perekonomian, kesehjateraan dan pembangunan desa. Program-program yang telah dilakukan PNPM Mandiri Perkotaan sejak tahun 2009 hingga saat ini adalah :

4.2.1.1 Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

Bantuan dana melalui PNPM Mandiri Perkotaan yang diberikan dalam bentuk dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang merupakan dana APBN/APBD yang disalurkan sebagai dana hibah kepada seluruh warga kelurahan dengan dprioritaskan kepada warga miskin. Pengelolanya dilakukan oleh masyarakat

melalui kelembagaan masyarakat tingkat basis kelurahan oleh Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM). Pemanfaatan dana BLM digunakan dengan berpedoman kepada PJM Pronangkis, pembelajaran aspek tridaya dan kesepakatan sehingga hasilnya benar-benar memberikan manfaat berkurangnya kemiskinan di kelurahan atau desa Buduran.

Dari hasil temuan berdasarkan metode wawancara yang dilakukan oleh peneliti, berikut adalah diantara penuturan yang disampaikan oleh Bapak “NY” selaku kordinator program PNPM Mandiri Perkotaaan di Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo :

“BLM sangat bermanfaat bagi warga desa Buduran terutama bagi warga yang kurang mampu karena dana ini bisa digunakan untuk modal dagang atau usaha yang mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari” (Hasil wawancara, 5 Mei 2014).

Senada dengan yang disampaikan Bapak “NY” selaku kordinator program PNPM Mandiri Perkotaan dalam pemberian dana BLM, berikut penuturan Ibu “N” selaku bendahara program PNPM Mandiri Perkotaan desa Buduran :

“Kita hanya memberikan Bantuan Langsung Masyarakat kepada warga yang benar-benar kurang mampu, dan warga yang mempunyai usaha tetapi kekurangan modal dalam menjalankan usahanya, kita survei di dalam kehidupan sehari-harinya” (Hasil wawancara, 5 Mei 2014)

Hal senada pun disampaikan oleh Bapak “A” selaku Kepala Desa Buduran yang menuturkan :

”Untuk pemberian BLM harus melalui proses dahulu dengan melakukan survey kepada warga yang bersangkutan, tidak serta merta langsung memberikan bantuan, hal ini dikhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan dana apabila diberikan kepada warga yang salah sasaran” (Hasil wawancara, 5 Mei 2014)

Tidak hanya memberikan BLM saja kepada warga yang kurang mampu serta warga yang mempunyai usaha dengan modal pas-pasan, tetapi disini warga diwajibkan memberikan suatu gambaran laporan usahanya kepada Balai Desa Buduran sebagai tempat pengambilan dana BLM. Hal ini diperlukan agar suatu waktu ada pendataan data, warga yang termasuk mendapatkan BLM, bisa mengajukan kembali bantuan melalui gambaran laporan usahanya. Dalam memberikan BLM warga juga harus memberikan syarat-syarat tertentu sebagai pengajuan bentuk bantuan yang harus dipertanggung jawabkan, dengan adanya BLM ini sebagaian dari masyarakat sangat terbantu dengan adanya program ini dan meningkatkan taraf hidup mereka. Yang mana disampaikan oleh salah satu masyarakat penerima bantuan yang merupakan warga asli desa Buduran yaitu Ibu “K” sebagai berikut :

“Dengan adanya BLM ini sangat membantu dan memberikan sedikitnya nafas ditengah kekurangan modal usaha jual daging saya di pasar dan keliling, tetapi kalau bisa untuk kedepannya harapan saya dana bantuannya ditambah lagi” (Hasil wawancara, 7 Mei 2014)

Ibu “K” ini merupakan warga desa Buduran yang sejak awal BLM diturunkan sudah tercatat sebagai warga penerima bantuan. Dan usahanya yang berjalan sampai saat ini bersumber dari adanya bantuan dana BLM di PNPM Mandiri perkotaan desa Buduran.

Penuturan lain yang disampaikan warga desa Buduran yaitu Ibu “KH” sebagai berikut :

“Dana BLM sangat bermanfaat bagi toko kecil saya, setidaknya dana ini bisa digunakan sebagai modal kulakan barang-barang yang belum bisa saya beli, Cuma kalo bisa modalnya ditambah lagi biar usaha saya bisa terus berjalan” (Hasil wawancara, 7 Mei 2014)

Senada yang disampaikan oleh ibu “K” mengenai program bantuan BLM, berikut penuturan yang disampaikan oleh ibu “S” :

“Saya sudah merasakan bantuan BLM, ketika saya dengar dibalai desa ada PNPM yang dapat memberikan modal, kemudian saya tanya pada pamongnya dan saya pun mengajukan diri daftar sebagai penerima dengan alasan warkop saya kekurangan modal”
(Hasil wawancara, 7 mei 2014)

Demikian tanggapan dari sebagian masyarakat mengenai dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dalam memberdayakan masyarakat yang kurang mampu sehingga dana BLM ini bisa dimanfaatkan sebagai modal usaha sebaik-baiknya. Namun dari sekian warga yang mendapatkan bantuan terdapat salah satu warga yang mengeluhkan tidak dapat membayar angsuran pinjaman dana BLM dengan tepat waktu. Terdapat banyak faktor yang mengakibatkan seorang warga terkendala tidak dapat angsuran secara rutin dan tepat waktu. Salah satu warga menuturkan bahwa dalam membayar angsuran mengalami kesulitan karena banyaknya tanggungan hutang yang dimiliki sebelumnya, sehingga hasil usaha tidak mencukupi untuk menutupi semua hutang-hutang tersebut.

Berikut penuturan dari salah satu warga yang berinisial “S” :

“saya pake untuk usaha dagang saya. Mana cukup modal yang sedikit buat kulakan, Pinjaman dari balai desa (BLM) saya pake buat bayar hutang-hutang dahulu mas, sisanya bayar barang ini-itu, belum tiap bulan bayar cicilannya, walaupun terasa ringan buat anda, tetapi berat bagi saya mas” (Hasil wawancara, 8 mei 2014)

Adapun pendapat masyarakat umum yang bukan penerima bantuan BLM mengenai program bantuan ini, yang mana disampaikan oleh Bapak “J” sebagai berikut :

“Dana BLM bisa membantu masyarakat dalam mengelola usahanya apabila digunakan memang pada porsinya dan tidak digunakan untuk keperluan lainnya” (Hasil wawancara, 8 mei 2014)

Demikian pendapat dari masyarakat umum mengenai dana bantuan BLM yang mana pendapat mereka adalah BLM cukup berperan dalam membantu usaha kecil mereka ditengah keterbatasan dana yang dimiliki.

4.2.1.2 Program Perbaikan Sarana dan Prasarana Desa

Untuk kejelasan tentang program perbaikan sarana dan prasarana desa serta penggunaan dana sarana dan prasarana desa, TPK bersama kordinator desa membuat sebuah rincian realisasi kegiatan dan biaya berikut rekapitulasinya. Di dalam realisasi kegiatan dan biaya dibuat secara terpisah antara setiap kegiatan. Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB) harus dibuat sesuai kondisi terlaksana di lapangan dan menunjukkan target akhir dari pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Buduran. Harga-harga satuan, volume, jumlah HOK terserap, besarnya, dan distribusi dana dari setiap kegiatan di luar prasarana harus berdasar kondisi aktual di lapangan dan sesuai dengan catatan yang ada pada buku kas umum. RKB merupakan bagian penting dari kegiatan ini. RKB juga memberikan manfaat untuk menjelaskan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada saat pemeriksaan atau audit. Pada kegiatan pembangunan prasarana perincian volume dan biaya tercantum pada format RKB yang sesuai dengan lapangan dan berkaitan erat dengan gambar-gambar purnalaksana yang juga merupakan lampiran dalam dokumen penyelesaian, yaitu denah atau *lay out*, peta situasi, detail kontruksi dan gambar-gambar lain.

Berikut ini adalah beberapa program perbaikan sarana dan prasarana desa yang telah dilaksanakan di Desa Buduran yang meliputi program fisik dan non fisik diantaranya:

1. Perbaikan jalan dan gang
2. Pavingisasi dan saluran
3. Pembuatan WC umum
4. Pembuatan saluran air
5. Pembuatan plengsengan
6. Peningkatan ekonomi masyarakat miskin
7. Pendidikan kualitas warga miskin
8. Rehab rumah
9. Pelatihan-pelatihan atau kursus
10. Budidaya jamur dan tanaman local
11. Pelatihan Menjahit
12. Pelatihan membuat cinderamata
13. Pelatihan budidaya tanaman toga

Tujuan dari program perbaikan sarana dan prasarana desa adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai bagi warga desa Buduran serta meningkatkan

kualitas dan kuantitas sarana dan prasana yang ada di desa Buduran sehingga efektifitas pembangunan desa bisa segera tercapai.

Berikut penuturan Bapak “NY” selaku kordinator PNPM Mandiri Perkotaan desa Buduran :

“Selain pinjaman dana, PNPM Mandiri juga memberikan bantuan sarana dan prasarana desa meliputi perbaikan fisik dan non fisik”
(Hasil wawancara, 5 Mei 2014)

Senada yang disampaikan oleh Kordinator PNPM Mandiri Perkotaan desa Buduran, berikut penuturan Kepala Desa Buduran Bapak “A” :

“Perbaikan sarana dan prasarana desa merupakan andil dari program PNPM Mandiri Perkotaan yang ada di desa ini sejak tahun 2009” (Hasil wawancara, 5 mei 2014)

4.2.2 Faktor pendukung dan penghambat efektifitas PNPM Mandiri Perkotaan dalam menunjang pembangunan di Desa Buduran

Keberhasilan atau kegagalan dari efektifitas PNPM Mandiri Perkotaan dalam menunjang pembangunan desa ditentukan oleh dua kondisi yang mempengaruhi, yaitu faktor pendukung dan penghambat. Dua faktor ini tidak dapat dilepaskan pada setiap program pemberdayaan apapun, tidak terkecuali pada efektifitas program PNPM Mandiri Perkotaan yang ada di desa Buduran.

Berikut penuturan yang disampaikan oleh Bapak “A” yang merupakan kepala desa Buduran mengenai faktor pendukung efektifitas program PNPM Mandiri Perkotaan yang ada di desa Buduran :

“Faktor pendukung bisa dilihat dari antuisme warga buduran sendiri yang ikut membantu dalam terlaksana kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh PNPM Mandiri Perkotaan, serta dukungan-dukungan dari Pemkab Sidoarjo sendiri dalam

pemberian dana untuk perbaikan sarana dan prasarana desa”
(Hasil wawancara, 5 Mei 2014)

Penuturan yang sama juga disampaikan oleh Bapak “NY” selaku kordinator
PNPM Mandiri Perkotaan desa Buduran :

“Faktor pendukung bisa dari warga sendiri serta dukungan gotong royong warga ketika ada kegiatan program PNPM Mandiri Perkotaan, serta peran Pemkab Sidoarjo” (Hasil wawancara, 5 Mei 2014)

a. Faktor pendukung

Faktor pendukung dipahami sebagai kondisi yang memperkuat efektifitas program PNPM Mandiri Perkotaan dalam menunjang pembangunan di desa Buduran. Berdasarkan temuan lapangan, faktor yang mendukung efektifitas program PNPM Mandiri Perkotaan yaitu :

1. Dukungan dari pemerintah, baik dari pemerintah kabupaten Sidoarjo yang menyertai dan mengawal program maupun dari pemerintah desa sendiri sebagai *stake holder* yang saling terkait yang memfasilitasi terselenggaranya kegiatan program PNPM Mandiri Perkotaan. Dalam hal ini peran dari pemerintah kabupaten Sidoarjo salah satunya adalah melakukan pengontrolan dan pemantauan pengelolaan kegiatan.

2. Dukungan dari masyarakat, baik dari tokoh masyarakat maupun warga secara umum. Partisipasi tokoh masyarakat turut membantu dalam memberikan dorongan motivasi kepada warga, sedangkan keterlibatan warga secara umum sangat dibutuhkan sebagai obyek sasaran utama dalam keberhasilan program pembangunan yang ada di pedesaan.
3. Antusiasme masyarakat, bahwa dengan adanya program dari PNPM Mandiri Perkotaan telah memacu masyarakat untuk ikut serta mendukung keberhasilan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat sendiri.
4. Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah kabupaten Sidoarjo dengan pemerintah desa Buduran sendiri

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dipahami sebagai kondisi yang memperlemah efektifitas program PNPM Mandiri Perkotaan dalam menunjang pembangunan di desa Buduran. Berikut ini penuturan yang disampaikan oleh Bapak “A” selaku kepala desa Buduran mengenai faktor penghambat efektifitas program PNPM Mandiri Perkotaan dalam menunjang pembangunan di desa Buduran :

“Kurangnya kordinasi antar kordinator serta anggota-anggota yang bersangkutan menyebabkan komunikasi yang buruk, seakan-akan yang handle kegiatan ini hanya satu orang, serta kesadaran masyarakat yang kurang bergairah dalam partisipasinya menyukseskan program PNPM Perkotaan yang ada di desa ini” (Hasil wawancara, 6 Mei 2014)

Penuturan serupa juga disampaikan oleh Bapak “NY” selaku kordinator program PNPM Mandiri Perkotaan desa Buduran :

“yang menghambat biasanya dari masyarakatnya sendiri yang kurang kesadaran akan pentingnya program PNPM serta masyarakat konsumtif bahwa dana-dana pinjaman PNPM tidak wajib dikembalikan karena bersumber dari pemerintah”(Hasil wawancara, 6 Mei 2014)

Senada dengan yang diucapkan sebelumnya, berikut penuturan dari Ibu “N” selaku bendahara program PNPM Mandiri Perkotaan di desa Buduran :

“yang menghambat biasanya dari warga sendiri yang kurang sadar akan pentingnya program PNPM yang ada di desa ini”(Hasil wawancara, 6 mei 2014)

Berdasarkan temuan di lapangan, faktor yang menghambat efektifitas program PNPM Mandiri Perkotaan di desa Buduran, yaitu :

1. Kurangnya kordinasi antar anggota yang bersangkutan, yang sering mengakibatkan komunikasi yang buruk, seakan-akan yang menghandle kegiatan hanya satu orang saja.
2. Masyarakat yang konsumtif, artinya dana pinjaman yang seharusnya digunakan untuk usaha tetapi mereka alihkan untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan pribadinya.
3. Tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang dan rendah dalam partisipasi mereka untuk turut andil dalam kegiatan program PNPM Mandiri perkotaan dan masyarakat yang beranggapan bahwa dana bantuan program PNPM Mandiri Perkotaan tidak wajib untuk dikembalikan

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Efektifitas Program PNPM Mandiri Perkotaan Dalam Menunjang Pembangunan Desa Buduran

Berbicara pembangunan desa, selama ini sebagian diantara kita terpaku pada pembangunan berskala besar (atau proyek pembangunan). Padahal pembangunan desa yang sesungguhnya tidak terbatas pada pembangunan berskala “proyek” saja, akan tetapi pembangunan dalam lingkup atau cakupan yang lebih luas. Pembangunan yang berlangsung di desa dapat saja berupa proses pembangunan yang dilakukan di wilayah desa dengan menggunakan sebagian atau seluruh sumber daya alam (biaya, material, sumberdaya manusia) bersumber dari pemerintah (pusat atau daerah), selain itu dapat pula berupa sebagian atau seluruh sumber daya pembangunan bersumber dari desa. Apa sesungguhnya pembangunan desa?

Sesungguhnya, ada atau tidak ada bantuan pemerintah terhadap desa, denyut nadi kehidupan dan proses pembangunan di desa tetap berjalan. Masyarakat desa memiliki kemandirian yang cukup tinggi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, mengembangkan potensi diri dan keluarganya, serta membangun sarana dan prasarana di desa. Namun demikian, tanpa bantuan dan perhatian dari pemerintah serta stimulant dari pihak-pihak luar proses pembangunan di desa berjalan dalam kecepatan yang relatif rendah. Kondisi ini yang menyebabkan pembangunan desa terkesan lamban dan cenderung terbelakang. Untuk bisa menekan laju pembangunan yang lebih baik, pemerintah menciptakan suatu program pemberdayaan masyarakat. Melalui program ini masyarakat diajak turut serta dalam mengembangkan potensi yang ada di wilayah desanya masing-masing. PNPM Mandiri Perkotaan sangat tepat untuk memberdayakan masyarakat dalam mengasah potensi dan kemampuan individu untuk kemandirian rumah tangga miskin.

Program PNPM Mandiri Perkotaan berfungsi sebagai program pemerintah yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan lebih menekankan pada peningkatan potensi diri serta pemberian dana pinjaman sebagai modal usaha. Dalam uraian hasil peneliti selama di lapangan, ditemukan bahwa pemberian bantuan dana merupakan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin sebagai modal usaha. Selain itu juga diadakannya program-program perbaikan sarana dan prasarana desa yang bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat dan desa itu sendiri.

Dengan diadakannya program perbaikan sarana dan prasarana desa, sebagian masyarakat berpendapat bahwa program ini sangat bermanfaat dalam pembangunan desa, sehingga pembangunan desa yang optimal bisa segera terealisasi.

Mengacu pada teori pembangunan oleh Rostow (1960) yaitu pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam garis lurus, yakni dari masyarakat yang terbelakang ke masyarakat yang maju. Proses ini, dengan berbagai variasi pada dasarnya berlangsung sama dimanapun dan kapanpun juga. Sehingga pelaksanaan pembangunan melalui program pemerintah yang berpusat pada masyarakat akan menghasilkan pembangunan yang optimal dan menghasilkan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Sedangkan mengacu pada teori Alex Inkeles dan David Smith, pada dasarnya berbicara tentang pentingnya faktor manusia sebagai komponen penting penopang pembangunan. Pembangunan bukan sekedar perkara pemasokan modal dan teknologi saja. Tetapi dibutuhkan manusia yang dapat mengembangkan sarana

material tersebut supaya menjadi produktif. Untuk ini, dibutuhkan apa yang disebut oleh Inkeles sebagai manusia modern. Dari hasil penelitiannya Inkeles dan Smith menjumpai bahwa memang pendidikan adalah yang paling efektif untuk mengubah manusia. Dampak pendidikan tiga kali lebih kuat dibandingkan dengan usaha-usaha lainnya

Peneliti sebelumnya tentang partisipasi masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan (Studi Deskriptif di Kelurahan Aek Simotung, Kecamatan Sumatera Utara), yang dilakukan oleh Angga Harahap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan. Program ini juga dapat dikatakan membawa perubahan yang positif baik dari segi lingkungan, pembangunan manusia, dan perihal pemberdayaan masyarakat. Namun ada sebagian masyarakat yang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan kelompok. Artinya, tidak semua masyarakat berpartisipasi dengan tujuan kesejahteraan kelompok melainkan upah atau imbalan. Disamping itu, adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap kader atau pelaku kegiatan di pedesaan. (Angga Harahap, 2010)

4.3.2 Faktor Pendukung Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Dalam Menunjang Pembangunan Desa Buduran

4.3.2.1. Faktor Pendukung

Berdasarkan temuan yang telah diuraikan sebelumnya mengenai faktor-faktor pendukung Efektifitas PNPM Mandiri Perkotaan dalam menunjang pembangunan di desa Buduran. Bahwa keberhasilan program PNPM Mandiri Perkotaan dalam melaksanakan kegiatannya tidak terlepas dari kerjasama antara semua pihak yang berkepentingan dalam hal ini, baik dari elemen pemerintah maupun masyarakat. Sebagaimana dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Dukungan Pemerintah

Pemerintah sebagai penggagas program melalui pemerintah Provinsi Jawa Timur dan diikuti oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah memberikan alokasi dana sebagai bantuan dana pendamping kepada masyarakat yang membutuhkan untuk mengembangkan usahanya. Selain itu juga dari unsur pemerintah desa yang menjadi faktor penting dalam menyelenggarakan program ini. Pemerintah desa sebagai instansi tertinggi di desa berkewajiban memfasilitasi dan terlibat aktif dalam penyelenggaraan program PNPM Mandiri Perkotaan. Karena kerjasama yang bersinergi dan kordinatif dari pemerintah akan membantu efektifitas jalannya program PNPM Mandiri Perkotaan yang ada di Desa Buduran.

2. Dukungan Masyarakat

Faktor dukungan dari tokoh masyarakat dan masyarakat umum setempat memberikan sambutan baik dan respon positif adanya program PNPM Mandiri Perkotaan sebagai program pemerintah yang dapat mengoptimalkan pembangunan desa, karena masyarakat merupakan obyek sasaran utama bagi program ini.

3. Antusiasme dan partisipasi masyarakat

Tanggapan positif dan antusiasme masyarakat dalam menyambut adanya program PNPM Mandiri Perkotaan. Hal ini merupakan kondisi yang sangat bagus untuk menyelenggarakan pembangunan desa yang lebih baik

4. Kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten

Kerjasama yang baik akan menghasilkan respon positif terkait dengan penyelenggaraan program PNPM Mandiri Perkotaan. Hal ini tentu berdampak baik terhadap program-program yang telah dijalankan di desa.

4.3.2.2. Faktor Penghambat

Berikut adalah pembahasan mengenai faktor-faktor yang menghambat efektivitas program PNPM Mandiri Perkotaan dalam menunjang pembangunan di desa Buduran :

1. Kurangnya koordinasi antara anggota yang bersangkutan akan memberikan komunikasi yang buruk antar anggota, hal ini sangat berpengaruh terhadap jalannya program yang sedang dijalankan. Kurangnya kerjasama antar anggota, sehingga anggota lain menganggap kegiatan hanya di handle satu orang saja. Hal ini juga membuat warga enggan untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan program PNPM Mandiri Perkotaan, tentunya hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah desa dalam membangun hubungan yang harmonis antara anggota yang tergabung dalam PNPM Mandiri Perkotaan yang ada di desa Buduran.
2. Budaya Konsumtif di masyarakat ketika memiliki harta lebih, rupanya juga mempengaruhi pola kehidupan masyarakat di desa Buduran, hal ini tampak

pada sebagian penerima bantuan dana program yang seharusnya digunakan untuk permodalan usaha tetapi mereka mengalihkannya untuk keperluan konsumsi pribadinya. Hal ini dilakukan karena mereka sedang terbelit masalah hutang atau tidak dapat menahan hasrat mengkonsumsi suatu barang, dengan tidak memperhitungkan konsekuensi kedepannya yang menyebabkan harta yang dimilikinya menjadi tidak produktif. Sehingga kesejahteraan ekonomi yang diharapkan tidak dapat terwujud dan berimbas tidak dapat mengembalikan dana yang telah dipinjam

3. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam turut andil berpartisipasi dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pengembalian dana pinjaman secara tepat waktu dan banyaknya warga yang menunggak turut menghambat kelancaran program PNPM Mandiri Perkotaan dalam menjalankan programnya. Munculnya persepsi sebagian masyarakat, bahwa dana yang digulirkan program PNPM Mandiri Perkotaan merupakan dana pemerintah yang tidak wajib untuk dikembalikan adalah sebuah paradigma yang perlu diluruskan, hal ini tentunya menjadi sebuah tanggung jawab semua elemen baik pemerintah maupun masyarakat yang lebih paham dan mempunyai tingkat kesadaran tinggi untuk dapat memberikan penjelasan dan pemahaman kepada masyarakat tentang persepsi tersebut

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan temuan hasil penelitian dan uraian dalam pembahasan maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- 5.1.1 Efektifitas program PNPM Mandiri Perkotaan dalam menunjang pembangunan di Desa Buduran adalah program pemberian dana pinjaman dan program-program perbaikan sarana dan prasarana desa dengan tujuan meningkatkan potensi masyarakat miskin dan Desa Buduran sendiri, Juga beberapa program ketrampilan dan kursus bagi warga yang belum pernah mengenyam pendidikan sekolah, dengan adanya program-program tersebut maka bisa dikatakan program PNPM ini bisa dikatakan efektif walaupun belum sepenuhnya.
- 5.1.2 Keberhasilan atau kegagalan program ditentukan oleh dua kondisi yang mempengaruhi, yaitu faktor pendukung dan penghambat, dalam hal ini faktor pendukung yang mendukung efektifitas program PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Buduran adalah; adanya dukungan dari pemerintah baik pemerintah provinsi, kabupaten maupun desa, dukungan masyarakat, antusiasme masyarakat serta kerjasama yang baik antara pemerintah desa dengan pihak-pihak yang terkait. Adapun faktor yang menghambat jalannya program adalah; kurangnya koordinasi antara anggota,

masyarakat yang konsumtif serta tingkat kesadaran masyarakat yang rendah.

5.2 Saran-saran

Dari temuan, pembahasan, dan kesimpulan yang telah dikemukakan maka dapat diambil beberapa rekomendasi yang diusulkan untuk mengatasi masalah efektifitas program PNPM Mandiri Perkotaan dalam menunjang pembangunan di desa Buduran :

- 5.2.1. Perlu adanya kerjasama antara pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan program serta penambahan modal sehingga usaha yang ada dapat diteruskan dan dikembangkan.
- 5.2.2. Perlu ditambah lagi pelatihan-pelatihan dan kursus yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat serta mengadakan suatu pelatihan yang berkaitan dengan manajemen usaha. Memberikan wawasan tentang tanggung jawab dan kesadaran mengembalikan pinjaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Bergel, Paul. 1955. *Social Stratification*. New York. Mcgraw Hill Book
- Budiman, Arif. 1995. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Budiyono, Agus. 2010. *Dampak Pelaksanaan Program Mandiri Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Desa Darupono Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal*. Semarang: IKIP PGRI Semarang
- Chambers, Robert (1998). *Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang*. Jakarta: LP3ES
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989. *Kamus Besar Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Goltschalk, Louis. 1975. *Mengerti Sejarah Pengantar Metode Sejarah Louis Goltschalk*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Harahap, Angga. 2010. *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (Studi Deskriptif di Kelurahan Aek Simotung, Kecamatan Simotung, Sumatera Utara)* Universitas Sumatera Utara
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Penerbit Salemba
- Inkeles, Alex & David H. Smith, 1974. *Becoming Modern, Individual Change in Six Developing Countries*, Cambridge: Harvard University Press
- Kinanti, Ayu Sagita. 2010. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Di Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan Kota Surabaya (Studi Mengenai Pengelola Lingkungan)*. Surabaya: Universitas Pembangunan Negara Jawa Timur
- Koentjaraningrat, (1977). *Masyarakat Desa di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Landis, Paul. 1948. *Rural Life in Process*. New York: Mcgraw-Hill Book
- Moleong, L. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Rihadini, Mustika. 2012. *Efektifitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan Di Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara*. Padang: Universitas Sumatera Utara
- Rostow, W.W. 1960. *The Stages of Economic Growth: A Non Communist Manifesto*, Cambridge: Cambridge University Press
- Roucek. 1984. *Sociology an Introduction*. Solo: Bina Aksara
- Sai Samosir, Ahmad. 2012. *Dampak Program Dana Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Medan Kota*. Universitas Sumatera Utara
- Sellato, Bernard. 1992. *Plaited arts from the borneo rain forest*. Honolulu: University of Hawai
- Steers, Richard. M. 1985. *Managing effective organization*. Boston. Ket pub
- Sugiyono, 2009 *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

- Suryono, Agus.2004. *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang. UM Press
- Sumaryadi, I Nyoman, (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Citra Utama
- Tim Koordinasi PNPM Mandiri, 2008. *Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri RI.
- Tim Pengendali PNPM Mandiri, 2007. *Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri*. Jakarta: Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Surabaya: CV. Pustaka Agung.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah. Surabaya: CV. Pustaka Agung
- Yunelimeta, (2008). *Pembangunan Pedesaan Dalam Konteks Agropolitan*, <http://id.wikipedia.org/wiki/PNPM.Mandiri.perkotaan> diakses pada 2 Februari 2014
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Efektifitas> diakses pada 3 Februari 2014
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakatdesa> diakses pada 5 Februari 2014
- www.google.com <http://www.beritassidoarjo.pnpm-mandiri> diakses pada 3 Februari 2014
- www.pnpm-mandiri.org diakses pada 3 Februari 2014

Data Informan

Informan 1

1. Nama Informan : M.A
2. Alamat : JL Gang Jogger, No 5 Buduran Sidoarjo
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Umur : 44 tahun
5. Pendidikan : S1
6. Jabatan : Kepala Desa
7. Suku : Jawa

Informan 2

1. Nama Informan : IGB. NY
2. Alamat : JL Langgar Panggung No 33 Buduran Sidoarjo
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Umur : 51 tahun
5. Pendidikan : SMA
6. Jabatan : Kordinator PNPM Mandiri Perkotaan Desa Buduran
7. Suku : Bali

Informan 3

1. Nama Informan : N.I
2. Alamat : JL Balai Desa Utara No 19 Buduran Sidoarjo
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Umur : 39 tahun
5. Pendidikan : S1
6. Jabatan : Bendahara PNPM Mandiri Perkotaan Sidoarjo

7. Suku : Jawa Cina

Informan 4

1. Nama Informan : R
 2. Alamat : JL Balai Desa Barat, No 23 Buduran Sidoarjo
 3. Jenis Kelamin : Perempuan
 4. Umur : 37 tahun
 5. Pendidikan : SMA
 6. Jabatan : Perangkat Desa
 7. Suku : Jawa

Informan 5

1. Nama Informan : K
 2. Alamat : JL , Balai Desa Barat, No 18 Buduran Sidoarjo
 3. Jenis Kelamin : Perempuan
 4. Umur : 45 tahun
 5. Pendidikan : SMP
 6. Jabatan : -
 7. Suku : Jawa

Informan 6

1. Nama Informan : K.H
 2. Alamat : JL Balai Desa Barat No 7 Buduran Sidoarjo
 3. Jenis Kelamin : Perempuan
 4. Umur : 60 tahun
 5. Pendidikan : SD
 6. Jabatan : -

7. Suku : Jawa

Informan 7

1. Nama Informan : J
 2. Alamat : JL Balai Desa Utara, No 8 Buduran Sidoarjo
 3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 4. Umur : 40 tahun
 5. Pendidikan : SMA
 6. Jabatan : -
 7. Suku : Jawa

Informan 8

1. Nama Informan : S
 2. Alamat : JL Balai Desa Barat, No 6 Buduran Sidoarjo
 3. Jenis Kelamin : Perempuan
 4. Umur : 44 tahun
 5. Pendidikan : SD
 6. Jabatan : -
 7. Suku : Jawa

PEDOMAN WAWANCARA

Untuk Kepala Desa

1. Sejak kapan pak program PNPM Mandiri ada di Desa Buduran? Berbentuk PNPM Mandiri Pedesaan atau Perkotaan?
2. Bagaimana pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Buduran?

3. Program-program apa saja yang dilaksanakan dalam program PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Buduran
4. Menurut Bapak, seberapa efektif program PNPM Mandiri Perkotaan dalam menunjang pembangunan desa di Desa Buduran?
5. Bagaimana penilaian bapak terhadap kinerja PNPM Mandiri Perkotaan di desa Buduran?
6. Langkah-langkah apa saja yang masih perlu dilakukan untuk memperbaiki kinerja PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Buduran
7. Apakah Program PNPM ini sudah dapat dikatakan dapat membantu pembangunan di Desa Buduran?

Untuk Kordinator dan Bendahara PNPM Mandiri Desa Buduran

1. Bagaimana pendapat bapak / ibu tentang pelaksanaan program PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Buduran?
2. Bagaimana pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Buduran?
3. Program-program apa saja yang dilaksanakan dalam program PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Buduran
4. Menurut Bapak, seberapa efektif program PNPM Mandiri Perkotaan dalam menunjang pembangunan desa di Desa Buduran?
5. Bagaimana penilaian bapak terhadap kinerja PNPM Mandiri Perkotaan di desa Buduran?
6. Langkah-langkah apa saja yang masih perlu dilakukan untuk memperbaiki kinerja PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Buduran
7. Apakah Program PNPM ini sudah dapat dikatakan dapat membantu pembangunan di Desa Buduran?

Untuk Masyarakat Desa Buduran

1. Sejak kapan pak/bu program PNPM Mandiri ada di Desa Buduran?

2. Bagaimana pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Buduran?
3. Program-program apa saja yang Bapak/Ibu tahu di dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri Perkotaan?
4. Menurut Bapak/ibu seberapa efektif program PNPM Mandiri Perkotaan dalam menunjang pembangunan desa di Desa Buduran?
5. Bagaimana penilaian bapak terhadap kinerja PNPM Mandiri Perkotaan di desa Buduran?
6. Langkah-langkah apa saja yang masih perlu dilakukan untuk memperbaiki kinerja PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Buduran?
7. Apakah Program PNPM ini sudah dapat dikatakan dapat membantu pembangunan di Desa Buduran?

Lokasi Penelitian Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten



Sidoarjo

Lokasi Penelitian Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo



Program PNPM Mandiri Perkotaan Perbaikan Rumah Warga



Program PNPM Mandiri Perkotaan

Pavingisiasi



Dokumentasi wawancara peneliti dengan informan



Foto Peneliti Bersama Kepala Desa Buduran



Program PNPM Mandiri Perkotaan Rehab Rumah Warga





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK

Program Studi:

Ilmu Komunikasi : Akreditasi No.027 / BAN / - PT / AK - XII / S1 / IX / 2009

Ilmu Administrasi Negara : Akreditasi SK No. 045 / BAN / PT / AK-XII / S1 / II / 2010

Alamat : Kampus I UMSIDA, Jl. Mojopahit 666B Sidoarjo 61215, Telp. 031-8945444, 8928097 Ext. 20 Faks. 031-8949333

website : www.umsida.ac.id

Nomor : E.6/0700.07/III/2014
 Lamp : -
 Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth.

BANKESBANGPOL Kabupaten Sidoarjo

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa nama di bawah ini :

Nama : Yogi Eka Prastiya
 NIM : 102020100012
 Semester : VIII
 Jurusan : Administrasi Negara / FISIP
 Alamat : Jalan Balai Desa Barat Rt 10 Rw 04
 Buduran-Sidoarjo

Adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Terkait dengan tugas akhir Skripsi dengan judul **Efektifitas Program PNPM Pedesaan Dalam Menunjang Pembangunan Desa di Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo**, dengan ini kami mengharap kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut diatas.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Sidoarjo, 24 Maret 2014

Dekan FISIP,



Tolok Wahyu Abadi, M.Si



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Raya A. Yani No. 4 Telp./Fax. 031 8921954

SIDOARJO - 61211

www.bakesbangpol.sidoarjokab.go.id

Sidoarjo, 27 Maret 2014

Nomor : 072/ 316/404.6.4/2014
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Perihal : Permohonan Ijin Penelitian
 An. Sdr. **YOGI EKA PRASTIYA**

Kepada
 Yth. Sdr. Camat Buduran

di
SIDOARJO

Berdasarkan Surat dari Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Nomor :
 E.6/0079/00.07/III/2014 Tanggal : 24 Maret 2014 Perihal Permohonan Ijin Penelitian, maka bersama ini
 kami hadapkan :

Nama : **YOGI EKA PRASTIYA**
 Tempat/Tgl Lahir : Sidoarjo, 18 Oktober 1990
 Fakultas/Jurusan : FISIP Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
 NIM/NIP : 102020100012
 Alamat : Jl. Balai Desa Barat Rt. 10/04 Buduran SidoarjoTlp. (085755145778)
 Judul : Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Dalam
 menunjang Pembangunan Desa (Studi di Desa Buduran Kec. Buduran Kab. Sidoarjo)
 Lama survey : 01 April s/d 31 Mei 2014 TMT Surat ini dikeluarkan
 Pengikut : -

Untuk melakukan penelitian/survey/PKL/KKn di Instansi/Wilayah Saudara guna kepentingan studi,
 dengan syarat-syarat/ketentuan sebagai berikut :

1. Yang bersangkutan harus mentaati ketentuan/peraturan yang berlaku dimana dilakukannya penelitian/survey/PKL/KKn
2. Dilarang menggunakan questioner diluar design yang telah ditentukan.
3. Yang bersangkutan diberi tugas sesuai relevansinya dengan mata kuliah / pelajaran di sekolah / perguruan tinggi
4. Yang bersangkutan sesudah melakukan penelitian harap melaporkan pelaksanaan dan hasilnya ke Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sidoarjo.
5. Surat Keterangan ini akan dicabut/tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi syarat syarat serta ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN SIDOARJO

Sekretaris



ZAINUL ARIFIN, SH

Pembina

NIP. 19630421 198603 1 016

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Kepala Bappeda Kab. Sidoarjo
 2. Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
 3. Yang bersangkutan